



**DINAMIKA PEMANFAATAN DANA KARTU JAKARTA
PINTAR (KJP) PLUS BAGI KELUARGA BENEFISIARI**

(Studi Deskriptif Pada Keluarga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kelurahan
Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan)

*diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial*

SKRIPSI

Oleh :

Sabila Alfina Syarani

220910301054

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

JEMBER

2026

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, berkah, serta kekuatan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada orang tua penulis, Ibu dan Ayah yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta motivasi yang tiada henti dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas segala perjuangan dan kepercayaan yang telah diberikan selama ini. Kehadiran mereka adalah alasan terkuat bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan ini. Setiap pencapaian yang diraih tidak terlepas dari doa dan pengorbanan yang telah diberikan dengan penuh cinta dan kesabaran.
2. Adik tercinta, yang senantiasa hadir dengan canda, perhatian, dan dukungan yang menjadi sumber semangat bagi penulis. Terima kasih atas doa, perhatian, dan kebersamaan yang diberikan kepada penulis selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan, yang telah menemani, membantu, mendukung, serta berbagi pengalaman selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan dan kenangan yang berharga.
4. Seluruh dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial yang dengan tulus memberikan ilmu, pelajaran, serta bimbingan yang berharga selama proses perkuliahan. Terima kasih atas dedikasi dan kesabaran dalam mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini.
5. Almamater tercinta, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, yang telah menjadi tempat penulis belajar, berkembang, dan memperoleh pengalaman berharga dalam menempuh pendidikan tinggi.

MOTTO

O Allah, it is Your mercy that I hope for, so do not leave me in charge of my affairs even for a blink of an eye, and rectify for me all of my affairs. None has the right to be worshiped except You.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sabila Alfina Syarani

NIM : 220910301054

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Dinamika Pemanfaatan Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Bagi Keluarga Benefisiari (Studi Kasus Pada Keluarga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam kutipan disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 Juni 2026

Yang menyatakan



Sabila Alfina Syarani

220910301054

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *Dinamika Pemanfaatan Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Bagi Keluarga Benefisiari (Studi Kasus Pada Keluarga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan)*.

Hari : Selasa
Tanggal : 7 Juli 2026
Tempat : Ruang Sidang Skripsi FISIP UNEJ

Pembimbing

1. Pembimbing Utama

Nama : Atik Rahmawati, S.Sos., M.Kesos., Ph.D.

NIP : 197802142005012002

Tanda Tangan



(.....)

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Budhy Santoso, S.Sos., M.Si., Ph.D

NIP : 197012131997021001

Tanda Tangan



(.....)

2. Penguji Anggota

Nama : Arif. S.Sos., M.AP

NIP : 197603102003121003



(.....)

ABSTRAK

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus merupakan program bantuan sosial pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tujuannya untuk mencegah angka putus sekolah peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Meskipun telah memiliki ketentuan penggunaan yang jelas, pada realitasnya pemanfaatan dana KJP Plus oleh keluarga penerima manfaat sering dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang mereka hadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana dinamika pemanfaatan dana yang dialami oleh keluarga benefisiari KJP Plus pada keluarga perempuan rawan sosial ekonomi yang tinggal di kawasan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana KJP plus oleh keluarga benefisiari tidak sepenuhnya digunakan sesuai dengan ketentuan program yang berfokus pada kebutuhan pendidikan anak. Dana KJP Plus juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti kebutuhan pangan keluarga, pemberian uang saku dan tabungan masa depan anak yang bersumber dari dana KJP Plus dengan cara yang tidak sesuai aturan. Hasil dari temuan menunjukkan bahwa pemanfaatan dana KJP Plus tidak hanya dipengaruhi oleh aturan program, tetapi juga kebutuhan keluarga yang berubah-ubah dan kondisi sosial ekonomi yang rentan dialami oleh keluarga perempuan rawan sosial ekonomi sebagai keluarga benefisiari KJP Plus.

Kata Kunci: KJP Plus, bantuan sosial, keluarga benefisiari, perempuan rawan

ABSTRACT

The Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus program is an educational social assistance program provided by the Provincial Government of DKI Jakarta aimed at preventing school dropouts among students from low-income families. Although the program has clear regulations regarding the use of its funds, in reality, the utilization of KJP Plus funds by beneficiary families is often influenced by the socio-economic conditions they face. This study aims to describe and explain the dynamics of KJP Plus fund utilization among socio-economically vulnerable women beneficiaries living in Kebayoran Lama Selatan Subdistrict, South Jakarta. This research employed a qualitative approach using a case study method. Informants were selected through a snowball sampling technique. The findings reveal that KJP Plus funds were also used to fulfill basic household needs, such as food consumption, children's pocket money, and future savings for children through practices that did not always comply with program regulations. The findings indicate that the utilization of KJP Plus funds is influenced not only by program regulations but also by changing family needs and the vulnerable socio-economic conditions experienced by women-headed beneficiary households.

Keywords: *KJP Plus, social assistance, beneficiary families, socio-economically vulnerable women.*

RINGKASAN

Dinamika Pemanfaatan Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Bagi Keluarga Benefisiari (Studi Kasus Pada Keluarga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan) ; Sabila Alfina Syarani, 220910301054, 88 halaman, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Latar Belakang dari penelitian ini diawali dari fenomena Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebagai bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, dengan tujuan mencegah angka putus sekolah dan meringankan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung keluarga. Pada realitasnya pemanfaatan dana KJP Plus tidak hanya berkaitan dengan ketentuan dan regulasi yang sudah ditetapkan, namun kondisi sosial ekonomi yang dihadapi keluarga penerima manfaat juga memengaruhi bagaimana pemanfaatan dana bantuan KJP Plus yang telah diterima. Khususnya pada keluarga perempuan rawan sosial ekonomi sebagai keluarga benefisiari dari program KJP Plus. Pada keluarga perempuan rawan sosial ekonomi yang umumnya memiliki kerentanan ekonomi yang lebih tinggi akibat keterbatasan sumber daya dan ketidakstabilan pendapatan, dana KJP Plus sering kali menjadi bantuan yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini mendorong keluarga penerima manfaat untuk dapat menyesuaikan penggunaan dana bantuan, sehingga penggunaan dana tidak hanya diarahkan untuk kebutuhan pendidikan anak, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang dianggap lebih mendesak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif dengan penentuan lokasi penelitian yang dipilih secara *purposive* yaitu di Kelurahan Kebayoran Lama, Selatan Jakarta Selatan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *snowball sampling* yang melibatkan : satu kader dasawisma sebagai yang menghubungkan peneliti kepada 4 informan lain yaitu perempuan rawan sosial ekonomi (janda) sebagai penerima manfaat dari program KJP Plus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui kondensasi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana KJP Plus oleh keluarga benefisiari tidak sepenuhnya digunakan sesuai dengan aturan program yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. Pada realitasnya, pemanfaatan dana KJP Plus bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat. Kondisi tersebut membuat pola pemanfaatan dana KJP Plus tidak selalu sama dari waktu ke waktu karena penerima manfaat harus menyesuaikan penggunaan bantuan dengan situasi yang sedang mereka hadapi. Dari hasil penelitian, pemanfaatan dana KJP plus tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, tetapi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan anak.

PRAKATA

Segala puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia Nya yang senantiasa menyertai penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Dinamika Pemanfaatan Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Bagi Keluarga Benefisiari (Studi Kasus Pada Keluarga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan dan motivasi untuk penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng. IPM, selaku Rektor Universitas Jember.
2. Ibu Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Ibu Dr. Kusuma Wulandari, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Atik Rahmawati, S.Sos., M.Kesos., Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, masukan, pengetahuan, serta motivasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dr. Mahfudz Sidiq, M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
6. Kepada seluruh dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.

7. Kepada seluruh informan yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini, meluangkan waktu serta memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
8. Kayla, Misel, dan Imel, terima kasih telah menjadi rumah di tanah perantauan yang awalnya terasa sangat asing. Terima kasih telah menjadi tempat membagi lelah, berbagi resah, susah dan senang yang kita lalui bersama di perkuliahan ini. Terima kasih selalu hadir dalam setiap momen penting dan merayakan pencapaian kecil apapun. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa berharganya pertemanan ini bagi perjalanan hidup penulis.
9. Untuk teman-teman seperjuangan KS 22, khususnya Okky, Artica, Elita, terima kasih telah berjalan bersama hingga titik ini. Terima kasih telah menjadi teman diskusi, teman yang menyenangkan, dan membagi setiap pengalaman.
10. Iska, Nawang, Intan dan Yesa, terima kasih telah menjadi ruang baru bagi penulis untuk berbagi cerita, keluh kesah, tawa dan menjadi motivasi penulis selama penyusunan skripsi ini. Penulis harap bertemanan ini bisa terus terjalin dan terjaga hingga waktu yang lama.
11. Kepada Haura, Indah dan Intan, terima kasih atas persahabatan yang terus terjaga, dukungan yang tidak pernah putus meskipun jarak dan waktu yang tidak sama lagi. Terima kasih atas dukungan dan motivasi kepada penulis selama ini. Terima kasih telah menjadi teman bertumbuh penulis hingga sampai ke titik sekarang.
12. Kepada Mami dan Papi kos, terima kasih atas perhatian dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama 4 tahun ini. Terima kasih telah menerima penulis layaknya keluarga sendiri. Kehadiran mami dan papi menjadi salah satu anugerah yang akan selalu penulis syukuri.
13. Kepada penulis, Sabila Alfina Syarani, terima kasih telah berani memulai dan memilih untuk tidak berhenti. Terima kasih telah bertahan dalam setiap proses dan menerima kegagalan sebagai pelajaran. Semoga segala mimpi

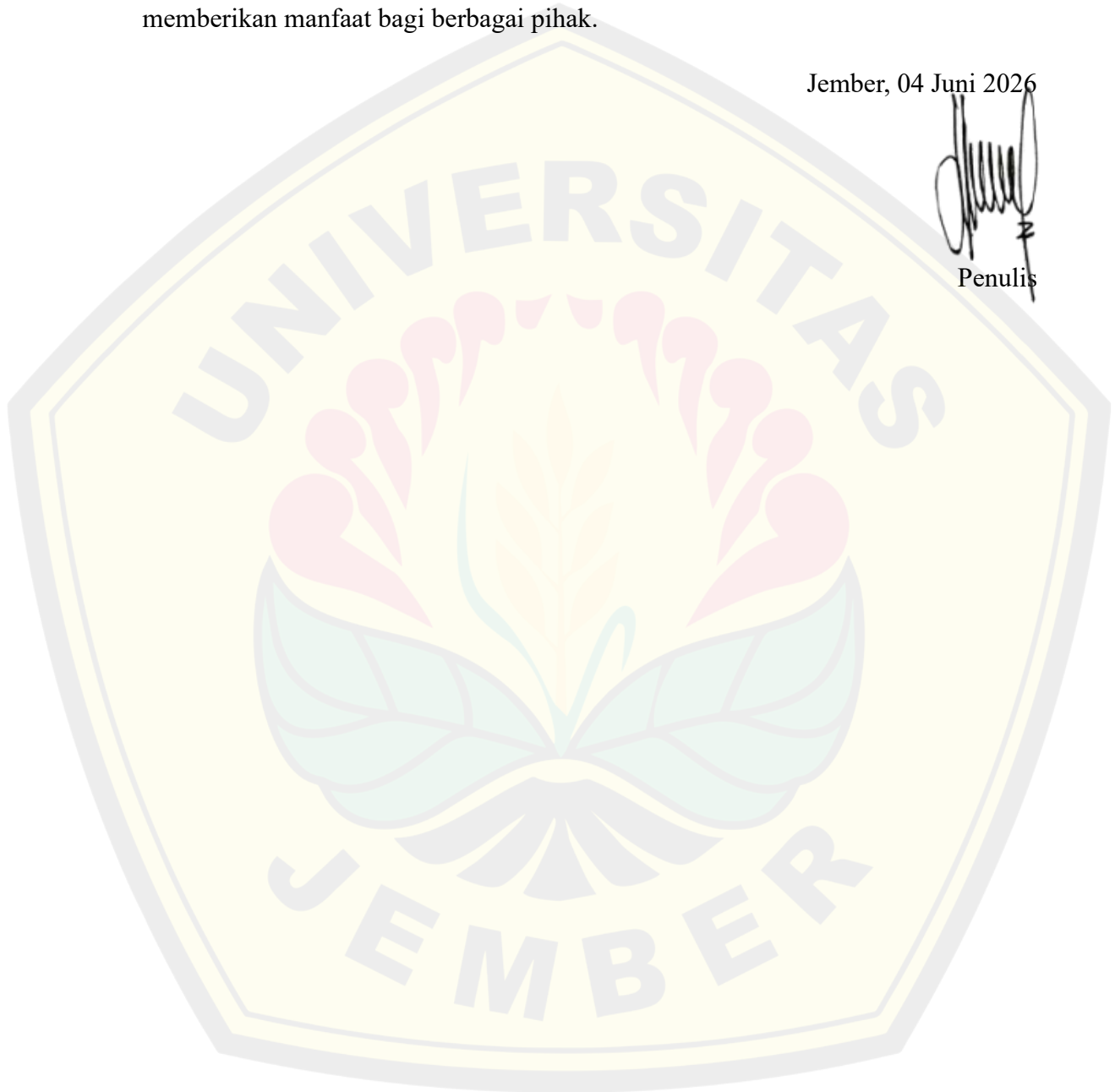
dan harapan yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh menemukan jalannya untuk bertumbuh dan menjadi nyata.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Jember, 04 Juni 2026



Penulis



DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
RINGKASAN	viii
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebagai Bantuan Sosial Pendidikan.....	8
2.2 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dan Pemenuhan Kebutuhan Keluarga	12
2.2.1 Karakteristik Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	13
2.2.2 Pemenuhan Kebutuhan Keluarga	14
2.3 Dinamika Pemanfaatan Bantuan Sosial Keluarga Benefisiari	14
2.3.1 Pemanfaatan Bantuan Sosial Oleh Keluarga Benefisiari.	19
2.3.2 Tekanan Ekonomi Keluarga	20
2.4 Penelitian Terdahulu	22
2.5 Kerangka Berpikir	25
BAB 3. METODE PENELITIAN	27
3.1 Pendekatan Penelitian.....	27
3.2 Jenis Penelitian	27
3.3 Teknik Penentuan Lokasi Penelitian.....	28
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	28

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5.1 Observasi	31
3.5.2 Wawancara.....	31
3.5.3 Dokumentasi.....	32
3.6 Teknik Analisis Data.....	33
3.7 Teknik Keabsahan Data	36
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Demografi, dan Kondisi Sosial Masyarakat	38
4.1.2 Gambaran Umum KJP Plus di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan ...	39
4.1.3 Deskripsi Informan Penerima Manfaat.....	42
4.2 Dinamika Pemanfaatan Dana KJP Plus oleh Keluarga Benefisiari.....	46
4.2.1 Pemanfaatan Dana KJP Plus untuk Kebutuhan Pendidikan Anak	46
4.2.2 Pemanfaatan Dana KJP Plus untuk Kebutuhan Keluarga.....	53
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	26
Gambar 3. 1 Sosiogram Informan Penelitian	29
Gambar 4. 1 Pemanfaatan kebutuhan pendidikan anak	52
Gambar 4. 2 Pemanfaatan kebutuhan keluarga.....	54
Gambar 4. 3 Struk pencairan tunai informan ID.....	56



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.". Meskipun program wajib belajar telah diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk penyediaan akses pendidikan gratis, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan partisipasi peserta didik. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai kebutuhan penunjang kegiatan belajar mengajar yang tetap harus dipenuhi oleh siswa, siswa tetap perlu mengeluarkan biaya untuk membeli seragam, buku tulis, alat tulis, dan lainnya. Kewajiban orang tua untuk menyediakan sarana tersebut kerap menjadi beban finansial keluarga, sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan keluarga juga turut memainkan peran penting dalam memengaruhi akses pendidikan.

Sebagai respons atas tantangan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebagai bantuan sosial pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Program ini diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Sosial Biaya Personal Pendidikan kepada Peserta Didik Melalui Kartu Jakarta Pintar Plus. Program KJP Plus bertujuan untuk membantu peserta didik memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan, seperti pembelian perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, serta kebutuhan penunjang pendidikan lainnya. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan akses, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan sehingga peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Menurut unggahan Instagram @upt.p4op, pada tahap I tahun 2025 terdapat 707.622 penerima KJP Plus dan 707.513 penerima KJP Plus tahap II, sehingga total penerima KJP Plus pada tahun 2025 sebanyak 1.415.134 siswa dari 1.687.497 peserta didik aktif (Kemendikdasmen, 2025) dengan besaran anggaran yang

diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1,61 Triliun untuk Tahap II KJP Plus tahun 2025 (*Pramono Teken KJP Plus Tahap 2, 707.513 Penerima-Anggaran Rp 1,61 T, 2025*). Besaran jumlah penerima dan anggaran KJP Plus yang telah diberikan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan hilangnya permasalahan putus sekolah di Jakarta. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2024 terdapat 442 jumlah anak putus sekolah di Jakarta, sedangkan pada tahun 2025 angka peserta didik putus sekolah mengalami banyak kenaikan yaitu tercatat 746 peserta didik yang mengalami putus sekolah diberbagai jenjang pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran yang besar melalui Program KJP Plus dan menjangkau sebagian besar peserta didik dari keluarga kurang mampu, permasalahan keberlangsungan pendidikan masih tetap ditemukan di lapangan. Keberadaan siswa yang masih mengalami putus sekolah mengindikasikan bahwa bantuan biaya pendidikan saja belum tentu mampu menyelesaikan seluruh persoalan pendidikan yang dihadapi keluarga penerima manfaat.

Kondisi ini menjadi semakin kompleks di wilayah Administrasi Jakarta Selatan karena adanya kontras antara kawasan elite maju dengan permukiman padat penduduk. Meskipun Jakarta Selatan dikenal sebagai kawasan elit yang didorong dengan harga properti yang mahal, perumahan mewah dan banyaknya lokasi perkantoran yang strategis, kondisi tersebut tidak menutup fakta bahwa masih banyaknya warga Jakarta Selatan dengan kondisi ekonomi rentang yang masih memerlukan bantuan dari pemerintah. Data dari Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) mencatat 104.440 siswa di Jakarta Selatan yang terdaftar sebagai penerima KJP Plus pertahun 2025. Hal ini didukung oleh penelitian Fatah (2024) yang mengatakan bahwa Jakarta Selatan sebagai kawasan metropolitan dengan kepadatan penduduk tinggi, memengaruhi pola komunikasi, nilai, dan gaya hidup suatu keluarga termasuk tuntutan pemenuhan kebutuhan material dan konsumsi yang tinggi. Sehingga berdampak langsung pada tekanan ekonomi keluarga yang lebih berat.

Secara ideal, dana KJP dianggarkan pemerintah provinsi DKI Jakarta secara khusus untuk memenuhi kebutuhan pendukung pendidikan. Manfaat dari adanya bantuan KJP Plus ini dirasakan oleh banyak kelompok benefisiari, diantaranya keluarga prasejahtera, anak tidak sekolah, anak dengan disabilitas, dan keluarga perempuan rawan sosial ekonomi. Namun, pelaksanaan suatu program tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan dana bantuan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat. Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian dalam implementasi Program KJP Plus adalah adanya indikasi penggunaan dana bantuan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan peruntukan program.

Validnews.id (2023) dalam berita yang berjudul *"Pemprov DKI Diminta Data Ulang Keluarga Penerima KJP Plus"* menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk melakukan pendataan ulang terhadap keluarga penerima manfaat KJP Plus agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan program. Hal ini dikarenakan, adanya temuan penerima manfaat KJP Plus yang dinilai kurang sesuai dengan kriteria penerima bantuan, seperti keluarga yang masih memiliki kendaraan pribadi, pemanfaatan KJP Plus yang tidak sesuai aturan dan kondisi ekonomi yang dianggap mampu. Permasalahan utama dalam implementasi KJP Plus terletak pada validitas dan proses pembaruan data penerima manfaat yang masih belum berjalan optimal disebabkan oleh pelaksanaan program yang bergantung pada basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), namun pemutakhiran data masyarakat miskin masih belum dilakukan secara berkala dan belum mampu menyesuaikan dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Danadhyaksa et al., 2026).

Salah satu kelompok penerima manfaat program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus adalah keluarga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), yang menghadapi berbagai kerentanan dalam aspek sosial maupun ekonomi. Keluarga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) ini umumnya terdiri atas perempuan yang menjadi kepala keluarga akibat perceraian, ditinggal meninggal dunia oleh pasangan, ditelantarkan, maupun kondisi lain yang mengharuskan perempuan mengambil alih

tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. (Elmayandri dkk. (2018) dalam Firdaus et al., (2024)). Rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan umumnya memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja, pelayanan sosial, sumber daya, permodalan, fasilitas kredit, kepemilikan lahan, serta minimnya dukungan dari jaringan kekerabatan. Berbagai keterbatasan tersebut menyebabkan perempuan yang menjadi kepala rumah tangga lebih rentan mengalami kemiskinan, baik dalam bentuk kemiskinan relatif maupun kemiskinan absolut (Fajarwati et al., 2017).

Sebagai salah satu kelompok benefisiari Program KJP Plus, keluarga perempuan rawan sosial ekonomi dihadapkan pada berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pendapatan yang tidak tetap, tingginya beban tanggungan keluarga, serta meningkatnya kebutuhan hidup menyebabkan keluarga harus mengelola sumber daya yang dimiliki secara cermat. Dalam kondisi tersebut, keberadaan Program KJP Plus menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. Namun demikian, kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda pada setiap keluarga memungkinkan adanya cara, pertimbangan, maupun proses pengelolaan bantuan yang berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, ditemukan beberapa keluarga perempuan rawan sosial ekonomi yang menjadi penerima manfaat Program KJP Plus dengan karakteristik sosial ekonomi yang beragam. Salah satunya adalah ibu AN yang memiliki lima orang anak, tiga diantaranya masih berada diusia sekolah. Meskipun masih memiliki suami, tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga lebih banyak dijalankan oleh Ibu AN karena keterbatasan kontribusi ekonomi dari suaminya. Kondisi tersebut menyebabkan Ibu AN memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola kebutuhan rumah tangga sekaligus memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Kemudian terdapat Ibu ID, seorang ibu tunggal yang memiliki tiga orang anak, dua di antaranya masih bersekolah dan menjadi penerima

manfaat Program KJP Plus. Ibu ID memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya meskipun ia tidak memiliki pekerjaan yang tetap (freelancer) dan pendapatan yang tidak menentu. Kondisi serupa juga dialami oleh Ibu WL, seorang ibu tunggal dengan pendapatan minim yang tinggal bersama dua orang anaknya, kedua orang tuanya, dan satu adiknya. Sebagai salah satu kontributor dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari, Ibu WL cukup terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan pendidikan anaknya melalui program KJP Plus yang diterima.

Berbeda dengan ketiga informan lainnya, meskipun sama-sama seorang janda dan penerima manfaat KJP Plus, Ibu SR memiliki kondisi ekonomi yang relatif lebih stabil. Kondisi ekonomi Ibu SR relatif lebih stabil dibandingkan keluarga lainnya karena memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta. Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga perempuan rawan sosial ekonomi sebagai penerima manfaat Program KJP Plus tidak memiliki karakteristik sosial ekonomi yang sepenuhnya sama. Meskipun seluruh informan sama-sama merupakan keluarga perempuan rawan sosial ekonomi dan penerima manfaat Program KJP Plus, masing-masing memiliki latar belakang, kondisi ekonomi, pekerjaan, jumlah tanggungan, serta pengalaman hidup yang berbeda. Perbedaan kondisi ekonomi, status pekerjaan, dan jumlah tanggungan membentuk prioritas dan pertimbangan yang tidak selalu sama dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, keputusan pemanfaatan dana bantuan program yang diambil oleh masing-masing keluarga tidak selalu sama, melainkan menyesuaikan kondisi yang sedang dihadapi pada waktu tertentu (A. O. Sari et al., 2020).

Dari fenomena tersebut, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dinamika Pemanfaatan Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Bagi Keluarga Benefisiari, studi kasus pada keluarga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan” melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini nantinya bertujuan untuk mengungkap dinamika yang dialami oleh keluarga benefisiari dalam hal penggunaan dana KJP Plus sebagai program bantuan dari pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fenomena pada latar belakang, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu “Bagaimana dinamika pemanfaatan dana yang dialami oleh keluarga benefisiari KJP Plus pada keluarga perempuan rawan sosial ekonomi yang tinggal di kawasan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan”.

1.3 Tujuan Penelitian

Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bertujuan untuk membantu meningkatkan akses pendidikan yang merata bagi anak dari keluarga prasejahtera, yang dalam penelitian ini berfokus pada keluarga perempuan rawan sosial ekonomi yang hidup dalam kondisi rentan, serba terbatas dan berhadapan langsung dengan tekanan dari kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan hidup menjadi semakin berat dengan situasi lingkungan sekitar yang menuntut untuk beradaptasi dengan kota metropolitan salah satunya di kelurahan kebayoran lama selatan, Jakarta selatan. Karenanya, tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis dinamika pemanfaatan dana kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bagi keluarga benefisiari pada keluarga perempuan rawan sosial ekonomi yang tinggal di kawasan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Dinamika Pemanfaatan Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Bagi Keluarga Benefisiari (Studi Kasus Pada Keluarga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan)” diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak diantaranya :

- a. Perempuan rawan sosial sosial dan ekonomi sebagai penerima manfaat program KJP Plus, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pola, tantangan, serta peluang dalam memanfaatkan dana KJP.
- b. Keluarga benefisiari KJP Plus, sebagai refleksi bagi keluarga benefisiari untuk memahami kembali pengelolaan dana serta proses pengambilan keputusan dalam pemanfaatan dana bantuan sosial.

- c. Pemerintah lokal, khususnya pemerintah Kelurahan Kebayoran Lama, yaitu untuk memperoleh informasi faktual mengenai kondisi penerima manfaat program KJP Plus dan sebagai masukan dalam meningkatkan pengawasan, pendampingan serta efektivitas implementasi program KJP Plus.
- d. Masyarakat secara umum, yaitu sebagai pengetahuan tentang bagaimana program KJP Plus berjalan dan tantangan yang dialami oleh benefisiari, sehingga dapat menumbuhkan empati sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kelompok rentan dan juga anak-anak.
- e. Peneliti yang mempunyai ketertarikan kajian tentang pemanfaatan bantuan sosial khususnya KJP Plus, sebagai sumber referensi yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian selanjutnya dalam bidang kebijakan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebagai Bantuan Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, akses terhadap pendidikan yang layak dan berkualitas masih belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh anak di Indonesia. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu masih harus menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pendidikan, seperti keterbatasan biaya pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga rendahnya motivasi dan dukungan dari lingkungan sekitar. Berbagai kendala tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan yang diterima sehingga berdampak pada pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan sosial ekonomi di masa mendatang (D. A. Siagian, 2024). Pemenuhan hak atas pendidikan merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan membiayai sistem pendidikan nasional. Sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat undang-undang tersebut, maka pemerintah mengalokasikan anggaran di bidang pendidikan serta menyusun berbagai kebijakan dengan tujuan untuk memperluas akses, meningkatkan pemerataan, meningkatkan kesempatan dan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia melalui berbagai bantuan sosial.

Menurut Barrientos (2013), bantuan sosial (*social assistance*) merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial (*social protection*) yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui pemberian transfer kepada individu atau rumah tangga yang berada dalam kondisi miskin atau rentan. Tujuan utama bantuan sosial adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, melindungi kelompok rentan dari berbagai risiko sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program bantuan sosial pendidikan kemudian dikembangkan sebagai instrumen untuk mendukung peserta

didik, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu, agar tetap dapat mengenyam pendidikan (Nainah et al., 2023).

Salah satu bentuk bantuan sosial pendidikan di Provinsi DKI Jakarta adalah Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan program bantuan sosial pendidikan yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2012. Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) sejak awal ditujukan bagi siswa-siswi SD – SMA yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang tujuannya untuk mencegah angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas masyarakat Jakarta melalui pemerataan akses pendidikan. Tujuan spesifik lain nya adalah untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat dan meringankan biaya personal pendidikan. Secara regulatif, program ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 4 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Sosial Biaya Personal Pendidikan kepada Peserta Didik Melalui Kartu Jakarta Pintar Plus, yang mengatur tentang teknis pemberian, besaran, dan ketentuan penggunaan KJP Plus. Namun selanjutnya Pemerintah Provinsi DKI meninjau kembali kebijakan bantuan pendidikan yang sudah ada sebelumnya dengan menerbitkan Pergub No. 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan (BSBP) yang berfungsi sebagai landasan utama yang merinci persyaratan, mekanisme penyaluran, dan pengawasan bantuan pendidikan termasuk KJP/KJP Plus.

Program bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) beberapa kali mengalami perubahan dalam implementasinya, salah satunya perubahan nama dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) regular menjadi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus pada tahun 2017 di masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kedua program tersebut sama-sama bertujuan untuk memberikan bantuan dana pendidikan kepada keluarga kurang mampu untuk dapat mengakses layanan pendidikan secara merata minimal sampai tamat SMA/SMK (Wijaya et al., 2023). Dalam upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) menargetkan bantuannya secara spesifik kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kriteria penetapan penerima manfaat KJP

tidak ditentukan secara sembarangan, melainkan melalui proses verifikasi dan seleksi yang berpedoman pada data terpadu kesejahteraan sosial. Melalui website kjp.jakarta.go.id terdapat informasi terkait kriteria calon penerima bantuan KJP, yang diantaranya :

- a. Tidak merokok dan atau mengkonsumsi narkoba
- b. Orang tua tidak memiliki penghasilan yang memadai
- c. Menggunakan angkutan umum
- d. Daya beli untuk sepatu dan pakaian seragam sekolah/pribadi rendah
- e. Daya beli untuk buku, tas, dan alat tulis rendah
- f. Daya beli untuk konsumsi makan/jajan rendah
- g. Daya pemanfaatan internet rendah
- h. Tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensi mengeluarkan biaya

Selain kriteria yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan DKI Jakarta, calon penerima KJP juga harus memenuhi beberapa persyaratan administratif yang ketat. Persyaratan utama tersebut meliputi :

- a. Terdaftar dan masih aktif disalah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.
- b. Terdaftar dalam DTKS, DTKS Daerah dan/ atau data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- c. Warga DKI Jakarta Berdomisili di DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Selain penetapan kriteria dan persyaratan administratif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menetapkan aturan penggunaan dana KJP Plus yang diatur secara tegas dalam Peraturan Gubernur No. 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan (BSBP). Dana bantuan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan peserta didik, seperti pembelian perlengkapan sekolah (seragam, buku, tas, dan alat tulis), biaya transportasi, makanan bergizi, kacamata atau alat bantu khusus bagi penyandang disabilitas, serta biaya pendidikan (SPP). Pembatasan ini

dimaksudkan agar dana KJP benar-benar dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan belajar, bukan untuk kepentingan konsumsi rumah tangga yang tidak relevan dengan pendidikan. Untuk memastikan kepatuhan, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan pihak sekolah dan bank penyalur (Bank DKI) dalam melakukan monitoring serta pelaporan penggunaan dana oleh peserta didik.

KJP Plus tidak hanya dipandang sebagai bantuan sosial yang bersifat kuratif untuk meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga sebagai bantuan sosial preventif. Bantuan sosial preventif merupakan intervensi yang dirancang untuk mencegah munculnya permasalahan sosial yang lebih luas sebelum masalah tersebut berkembang menjadi kondisi yang lebih kompleks. Melalui pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu, KJP Plus berupaya mencegah berbagai risiko sosial, seperti putus sekolah, rendahnya partisipasi pendidikan, pekerja anak, hingga terjadinya transmisi kemiskinan antargenerasi (*intergenerational poverty*) (Uswanas & Nuraida, 2023). Dengan terpenuhinya kebutuhan biaya personal pendidikan, peserta didik diharapkan tetap dapat mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan tanpa terkendala oleh keterbatasan ekonomi keluarga.

Dengan jumlah penerima yang mencapai lebih dari setengah juta peserta didik setiap tahap, KJP Plus terbukti menjadi program dengan jangkauan terbesar di sektor pendidikan daerah. Data ini mengindikasikan bahwa KJP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia di Jakarta (Astuti & Fawzi, 2021). Melalui penyediaan akses pendidikan yang lebih merata, program ini diharapkan mampu menghasilkan generasi muda yang lebih berkualitas, produktif, dan kompetitif. Namun demikian, efektivitas program akan sangat bergantung pada akurasi data penerima, ketepatan sasaran, kepatuhan penggunaan dana, serta mekanisme pengawasan yang berkelanjutan. Dengan kombinasi antara dukungan finansial, regulasi yang jelas, dan evaluasi rutin, KJP Plus dapat terus menjadi salah satu bantuan sosial pendidikan yang strategis dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

2.2 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dan Pemenuhan Kebutuhan Keluarga

Dari banyaknya kategori Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) menjadi salah satu kelompok rentan karena menghadapi keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Dinas Sosial Kabupaten Jember, perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa baik yang sudah menikah maupun belum menikah, atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Salah satu penyebab utama wanita masuk ke dalam kategori perempuan rawan sosial ekonomi adalah kemiskinan, yang melibatkan ketidakberdayaan dan kesulitan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, prasarana dan kesehatan (Apriliandra et al., 2022). Perempuan dari kelompok sosial ekonomi sering mengalami kerentanan terhadap ketidakstabilan ekonomi yang langsung memengaruhi keluarga.

Kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil semakin mempersempit peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor publik. Perempuan yang berada dalam kelompok rawan sosial ekonomi umumnya menghadapi berbagai hambatan struktural seperti rendahnya tingkat pendidikan, akses terbatas terhadap pelatihan kerja, serta minimnya dukungan sosial dan kebijakan yang dapat membantu mereka untuk keluar dari kondisi tersebut (Septiawan & Wijaya, 2021). Kondisi ini akan lebih berat ketika perempuan berperan sebagai kepala rumah tangga dan penanggung jawab utama kebutuhan keluarga. Perempuan kepala rumah tangga tidak hanya harus mencari nafkah, tetapi juga menjalankan peran domestik seperti mengasuh anak dan mengelola rumah tangga. Pernyataan ini diperkuat lagi oleh Utomo & Haryani (2019) yang mengatakan rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan umumnya mengalami kemiskinan akibat tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan akses terhadap pekerjaan, layanan sosial, sumber produksi, modal, kredit, dan lahan, serta kurangnya dukungan sosial.

Keluarga perempuan rawan sosial ekonomi menghadapi permasalahan lain, meskipun hidup dalam kondisi keterbatasan ekonomi serta dukungan sosial yang kurang, mereka tetap perlu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, terlihat bahwa keterbatasan ekonomi tidak mengurangi

tanggung jawab perempuan rawan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarganya (Nurwati & Listari, 2021).

2.2.1 Karakteristik Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

Isu terkait perempuan yang berada dalam kondisi rawan sosial ekonomi merupakan isu yang sampai saat ini terus menjadi perhatian dalam kajian kesejahteraan sosial di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial, 2012) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah :

- a. Seorang perempuan dewasa berusia 18 sampai 59 tahun,
- b. Menikah, belum menikah atau janda dan
- c. Tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Perempuan rawan sosial ekonomi, selain tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena faktor kemiskinan, adapula faktor keterbelakangan dan kebodohnya mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial dan ekonominya. Hal ini menyebabkan yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam menjalankan peran sosialnya (Sulistiyowati et al., 2019).

Perempuan rawan sosial ekonomi perlu memiliki kapasitas, resiliensi, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis mereka secara baik. Walaupun Sebagian besar dari mereka memiliki tingkat pengetahuan dan latar belakang pendidikan yang terbatas, mereka tetap perlu memiliki keterampilan dan kemampuan untuk bertahan hidup serta menjalankan kehidupan sehari-hari. Perempuan rawan sosial ekonomi yang memiliki keterampilan sosial yang baik akan mampu juga berfungsi dengan baik dalam aspek psikologis dan sosialnya. Mereka akan yakin bahwa permasalahan yang mereka hadapi dapat diselesaikan melalui potensi internal diri mereka sendiri dan dukungan dari lingkungan eksternal (Arifin et al., 2019).

Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama terpadu dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri untuk memberikan perlindungan, dukungan dan pemberdayaan kepada kelompok perempuan rawan sosial ekonomi. Dengan kolaborasi tersebut, kondisi perempuan sebagai kelompok rentan diharapkan dapat membaik dan berdampak pula pada kehidupan sehari-hari mereka (J. P. Siagian & Subroto, 2024).

2.2.2 Pemenuhan Kebutuhan Keluarga

Kebutuhan keluarga dapat mencerminkan kekurangan dan ketidakseimbangan dalam lingkungan dan keluarga. Hal ini dapat mengganggu ketenangan dan kesejahteraan anggota keluarga, sehingga mendorong untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang lebih baik (Ruswati, 2018). Kebutuhan manusia dikelompokkan kedalam 5 jenis, yaitu kebutuhan fisiologis (*Physical Needs*) yang berkaitan dengan kondisi tubuh untuk bertahan hidup, seperti sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya, kebutuhan rasa aman (*safety needs*) melibatkan aspek psikologis dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan sosial (*social needs*) juga bersifat psikologis yang menyangkut kebutuhan dalam berinteraksi dan diterima di lingkungan sosial. Lalu, kebutuhan penghargaan (*esteem needs*) yaitu keinginan mendapat penghargaan, pengakuan, dan dihormati oleh orang lain. Terakhir, kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization*) yang mendorong individu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki (Maslow (1943) dalam (Yuliana, 2018)).

Keluarga perempuan dengan kondisi sosial ekonomi yang rentan, sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan menjadi prioritas dalam pemenuhan kebutuhan keluarga (Yulfa et al. 2022). Perempuan rawan sosial ekonomi sering kali memiliki peran ganda akibat keterlibatan langsung dalam bekerja mencari uang dan juga mengelola segala keperluan rumah tangga (Utomo & Haryani, 2019) dalam (Andari et al., 2022). Hal ini mereka lakukan sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka ditengah kondisi kerentanan terhadap aspek sosial dan ekonomi. Upaya perempuan rawan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan

keluarga tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan mereka saja, melainkan bagaimana cara mereka mengelola keuangan rumah tangga dengan efektif. Perempuan rawan sosial ekonomi yang juga berperan sebagai ibu rumah tangga, perlu memahami strategi dalam mengatur keuangan secara efektif (Febrian, 2021).

Selain upaya pemenuhan kebutuhan dari internal individu keluarga perempuan rawan sosial ekonomi, lingkungan sosial juga berperan dalam mendukung proses tersebut. Dukungan dari lingkungan sosial maupun komunitas lokal dapat memberikan bantuan tambahan pada keluarga perempuan rawan sosial ekonomi dalam mengurangi bebannya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Contoh nyatanya melalui pemberdayaan pada perempuan rawan sosial ekonomi. Konsep pemberdayaan ini memposisikan perempuan yang rentan secara sosial ekonomi untuk mengembangkan kemampuan diri dan mendorong mereka agar dapat berdaya. Sehingga, perempuan rawan sosial ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidupnya, termasuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki (Febrian, 2021).

Dalam memenuhi kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan ekonomi, keluarga tidak hanya bergantung pada besarnya pendapatan yang dimiliki, tetapi juga pada kemampuan mereka dalam menyusun strategi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Paul Valent dalam bukunya yang berjudul *“From Survival to Fulfillment: A Framework for the Life-trauma Dialectic”* menjelaskan bahwa *survival strategies* merupakan serangkaian respons dan upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu maupun rumah tangga untuk mempertahankan kelangsungan hidup ketika menghadapi ancaman, tekanan, atau kondisi yang membahayakan. Strategi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang tersedia, mengurangi pengeluaran melalui penyesuaian jumlah maupun kualitas konsumsi, serta menerapkan pola nafkah ganda dengan memanfaatkan lebih dari satu sumber penghasilan dalam rumah tangga (Snel & Staring dalam Astutik et al., 2019). Sejalan dengan pendapat tersebut, Suprianto dan Hidayati (2024) menjelaskan bahwa strategi bertahan hidup merupakan respons yang dilakukan individu atau rumah tangga dalam menghadapi tekanan dan kesulitan ekonomi.

Strategi tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan rumah tangga, baik dengan meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan berbagai peluang ekonomi maupun dengan mengendalikan pengeluaran agar sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Selain itu, setiap rumah tangga memiliki strategi yang berbeda dalam menghadapi tekanan ekonomi. Perbedaan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang rasional mengenai manfaat, risiko, serta sumber daya yang dimiliki, sehingga kemampuan setiap keluarga dalam merespons perubahan kondisi ekonomi juga tidak sama.

Pada keluarga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), strategi bertahan hidup (*survival strategies*) terlihat dari berbagai keputusan yang diambil untuk memenuhi kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Sebagai kelompok yang menghadapi kerentanan ekonomi sekaligus memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, perempuan rawan sosial ekonomi dituntut untuk mampu menentukan prioritas penggunaan sumber daya yang tersedia agar kebutuhan dasar keluarga tetap terpenuhi. Salah satu sumber daya tersebut adalah bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Dalam perspektif *survival strategy*, bantuan sosial tidak hanya dipahami sebagai bentuk perlindungan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan rumah tangga untuk mempertahankan keberlangsungan hidup ketika menghadapi keterbatasan ekonomi. Kehadiran bantuan sosial memberikan alternatif bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan yang belum mampu dipenuhi melalui pendapatan utama. Oleh karena itu, bantuan sosial dapat menjadi bagian dari strategi ekonomi keluarga, khususnya bagi rumah tangga yang berada dalam kondisi rentan, untuk mengurangi tekanan ekonomi sekaligus menjaga keberlangsungan fungsi keluarga.

Pemanfaatan bantuan sosial sebagai bagian dari strategi bertahan hidup sangat dipengaruhi oleh kondisi dan prioritas kebutuhan yang dihadapi setiap keluarga. Dalam situasi ketika pendapatan yang dimiliki masih mampu memenuhi kebutuhan dasar, bantuan sosial cenderung dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan. Namun, ketika keluarga mengalami tekanan ekonomi yang menyebabkan kebutuhan dasar, seperti kebutuhan pangan menjadi

lebih mendesak dibandingkan kebutuhan lainnya, keluarga akan melakukan penyesuaian terhadap pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Penyesuaian tersebut merupakan bentuk pertimbangan rasional untuk mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga dengan mengutamakan kebutuhan yang dianggap paling mendesak pada saat itu.

2.3 Dinamika Pemanfaatan Bantuan Sosial Keluarga Benefisiari

Dinamika adalah suatu sistem hubungan yang saling terkait dan saling memengaruhi antara unsur-unsur di dalamnya. Jika salah satu unsur sistem mengalami perubahan, maka akan membawa perubahan pula pada unsur-unsur lainnya (Munir (2001:16) dalam (Aditama, 2019)). Menurut S. P. Robbins & Judge (2013) dalam bukunya yang berjudul “Organizational Behavior”, dinamika merujuk pada kondisi lingkungan yang penuh dengan perubahan, tidak stabil dan sulit diprediksi, sehingga perlu adanya adaptasi dengan cepat. Dinamika terjadi ditandai dengan tingkat volatilitas (*volatility*) yaitu sejauh mana ketidakstabilan dan perubahan yang terjadi dengan cepat. Semakin tinggi volatilitas, semakin sulit individu atau kelompok untuk membuat perencanaan dan solusi yang tepat. Sehingga, individu atau kelompok dituntut untuk dapat bersifat fleksibel dan responsif dalam menghadapi dinamika yang terjadi (Robbins & Judge. 2013).

Pada bidang psikologi, konsep dinamika kemudian menjadi dasar munculnya teori psikodinamika yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Teori psikodinamika oleh Freud memfokuskan pada konsep bahwa perilaku manusia didasari oleh dorongan-dorongan tidak sadar yang berasal dari dalam diri individu dalam membentuk manusia tersebut. Teori ini menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian yang berfokus pada motivasi, emosi, konflik batin, dan aspek internal lainnya. Freud mengembangkan gagasan bahwa kepribadian terdiri dari tiga komponen utama yaitu id, ego, dan superego yang saling berkaitan dan mengalami konflik yang memengaruhi mental individu. Perilaku manusia sering kali dipengaruhi oleh pertentangan batin antara naluri (id), kenyataan (ego), dan dorongan moral normal (superego) (Freud dalam Hamidah et al., 2025). Berbagai

perilaku dan gejala psikologis sering muncul akibat dorongan, keinginan atau konflik yang tidak tersalurkan dengan baik oleh seorang individu.

Dari penjelasan sebelumnya, dalam konteks pemanfaatan bantuan sosial, dinamika dapat diartikan sebagai proses, perubahan dan pertimbangan yang terjadi oleh keluarga penerima manfaat dalam hal pemanfaatan bantuan sosial yang mereka terima. Perubahan-perubahan yang terjadi ini bisa berupa bagaimana cara keluarga memanfaatkan bantuan sosial tersebut, baik dari faktor internal seperti kondisi ekonomi, tingkat kebutuhan, dan gaya hidup, maupun faktor eksternal yang mencakup perubahan kebijakan, regulasi bantuan sosial, fluktuasi kebutuhan pokok dan ketersediaan layanan. Namun, dinamika pemanfaatan bantuan sosial tidak hanya dilihat dari respon terhadap adanya perubahan yang terjadi, tetapi juga berkaitan dengan proses psikologis dalam diri individu maupun keluarga. Dorongan, motivasi, emosi, konflik batin, dan aspek internal lainnya dapat memengaruhi dinamika yang dialami serta berpengaruh pada pengambilan keputusan oleh keluarga benefisiari bantuan sosial.

Program bantuan sosial yang ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengurangi angka kemiskinan, contohnya, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan lainnya. Ketika pemanfaatan bantuan sosial oleh keluarga benefisiari tidak bersifat tetap, misal adanya pengaruh dari situasi yang berubah-ubah dan tidak terduga, di situlah proses dinamika terjadi. Sehingga memaksa individu atau kelompok untuk bisa bersifat adaptif ketika mengalami sebuah dinamika. Ketika konsep ini diterapkan pada pemanfaatan bantuan sosial oleh keluarga benefisiari KJP Plus, apabila dilihat bahwa penggunaan bantuan untuk pendidikan bersifat statis, maka pola pemanfaatannya cenderung tetap dari waktu ke waktu. Sedangkan apabila penggunaan dana bantuan KJP Plus bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan yang ada, maka pola pemanfaatan tidak akan sama dari waktu ke waktu.

2.3.1 Pemanfaatan Bantuan Sosial Oleh Keluarga Benefisiari.

Benefisiari adalah seseorang atau kelompok yang menerima keuntungan atau manfaat dari sesuatu (B. Robbins, 2017). Benefisiari biasanya berasal dari kelompok rumah tangga prasejahtera atau rentan yang diidentifikasi melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus menjadi salah satu contoh bagaimana dinamika pemanfaatan bantuan sosial yang dialami oleh keluarga benefisiari. KJP Plus dirancang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai program bantuan pendidikan untuk anak dari keluarga prasejahtera yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemanfaatan KJP Plus bisa dilihat dari bagaimana keluarga benefisiari dapat menyesuaikan penggunaan bantuan tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu untuk kebutuhan pendidikan anak, seperti biaya sekolah, seragam, dan biaya transportasi. Meskipun terdapat regulasi dalam pemanfaatan bantuan sosial, namun dalam implementasinya muncul dinamika penggunaan bantuan tersebut terutama di kalangan keluarga benefisiari dengan kondisi rentan sosial ekonomi. Sebagai benefisiari dari sebuah program bantuan sosial, yang diberikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan memberantas kemiskinan, keluarga benefisiari menghadapi dilema dalam menggunakan dana bantuan tersebut. Di satu sisi, mereka memahami bahwa bantuan tersebut memiliki tujuan tertentu, namun di sisi lain tekanan kebutuhan hidup sehari-hari membuat mereka menggunakan dana tersebut untuk hal-hal diluar peruntukan program bantuan sosial yang mereka terima.

Dinamika pemanfaatan program KJP Plus pada implementasinya mencerminkan tantangan dan bahan evaluasi dari program tersebut. Banyak penelitian yang menyatakan pemanfaatan program KJP Plus sudah terlaksana dengan cukup baik, dimana keluarga benefisiari memanfaatkan dana bantuan tersebut sesuai dengan arahan dari pembuat program. Penggunaan dana KJP Plus sudah sesuai dengan Amandemen UUD 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya (Nurdin, 2019). Dalam hal ini dana KJP digunakan untuk kebutuhan pendidikan, namun ketika semua kebutuhan pendidikan tersebut sudah terpenuhi atau belum sepenuhnya terpenuhi,

keluarga benefisiari mengalami dilema mengenai pemanfaatan dana bantuan sosial tersebut untuk hal lain yang tidak ada kaitannya dengan tujuan program. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian Syahban (2024) yang mengungkapkan bahwa beberapa keluarga benefisiari KJP Plus menggadaikan kartu KJP Plus mereka kepada rentenir untuk meminjam uang guna melunasi hutang mereka. Dengan demikian, pemanfaatan bantuan sosial tidak bisa dipisahkan dari aspek tekanan ekonomi yang dialami keluarga benefisiari, sehingga perilaku penggunaan dana cenderung bersifat adaptif dan tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan yang menyimpang dari tujuan awal program.

2.3.2 Tekanan Ekonomi Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, termasuk kebutuhan pendidikan anak. Namun, dalam keluarga prasejahtera, keterbatasan sumber daya ekonomi sering kali menimbulkan tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kondisi kesulitan keuangan serius yang dialami keluarga sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya seperti pendidikan dan rekreasi (Wulandari et al., 2025). Tingkat tekanan ekonomi dalam keluarga dapat berkurang seiring dengan membaiknya kondisi pekerjaan dan peningkatan pendapatan yang dimiliki keluarga (Yulfa et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh akses terhadap pekerjaan yang layak, penghasilan yang mencukupi, serta adanya kepastian dalam memperoleh kebutuhan dasar. Dengan kondisi pekerjaan yang baik, keluarga tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat merencanakan masa depan, seperti pendidikan anak, tabungan, maupun investasi jangka panjang.

Tekanan ekonomi dalam keluarga dapat bersifat objektif, seperti rendahnya pendapatan dan tingginya pengeluaran, maupun subjektif berupa persepsi atau perasaan individu terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi (Fatimah et al., 2020). Tekanan ekonomi juga dapat memengaruhi interaksi anggota keluarga dan umumnya menyebabkan peningkatan perasaan depresi, pertengkaran, hingga

konflik besar dalam rumah tangga, hal inilah yang juga akan berdampak pada kesejahteraan keluarga itu sendiri. Tekanan ekonomi menjadi masalah yang sering dialami oleh banyak keluarga diseluruh dunia tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi ataupun budaya. Dampaknya tidak hanya membebani masing-masing individu, tetapi juga memengaruhi hubungan antar individu di dalam keluarga. Pengaruh yang timbul juga bervariasi tergantung pada peran dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, respon yang muncul juga akan berbeda-beda, berdasarkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dan menerapkan strategi koping yang efektif.

Tekanan ekonomi keluarga berkaitan dengan konsep pengambilan keputusan karena dengan kondisi ekonomi yang terbatas membuat setiap anggota keluarga perlu membuat keputusan dengan mempertimbangkan segala risiko yang ada. Pengambilan keputusan didefinisikan sebagai proses pemilihan suatu cara bertindak dari beberapa alternatif yang ada (Robbins & Judge, 2013). Proses ini merupakan respons terhadap suatu masalah atau peluang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam kondisi adanya tekanan ekonomi yang dialami sebuah keluarga, tiga tahap pengambilan keputusan menurut Herbert A. Simon dalam (Hakim et al., 2021) memerlukan ketelitian yang lebih dalam. Pada tahap *intelligence activity*, keluarga perlu mengenali dan memahami situasi ekonomi yang mereka alami secara objektif, seperti adanya kebutuhan yang mendesak atau ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya pada tahap *design activity*, tekanan ekonomi yang ada membuat keluarga perlu memiliki solusi alternatif yang realistis dan sesuai dengan keterbatasan mereka. Pada tahap *choice activity*, pemilihan solusi alternatif perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang, sehingga keputusan yang diambil dapat mengurangi risiko baru yang muncul di kemudian hari. Pengambilan sebuah keputusan dengan kondisi adanya tekanan ekonomi yang dialami memerlukan pertimbangan yang mendalam akibat keterbatasan ekonomi yang ada. Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari posisi seseorang dalam keluarga, jenis masalah yang dihadapi, situasi dan kondisi, hingga tujuan yang ingin dicapai (Pasolong, 2023). Adanya kondisi ekonomi yang tidak

stabil mempersempit pilihan yang dapat diambil oleh sebuah keluarga. Oleh karena itu, memperhatikan faktor-faktor tersebut akan membantu menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana dan mampu memberikan dampak positif bagi individu maupun keluarga.

2.4 Penelitian Terdahulu

Untuk memahami konteks dan perkembangan topik ini secara lebih mendalam, peneliti meninjau beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian ini, diantaranya :

Pada penelitian Lestari & Kananto (2020) dengan judul “Analisis Penggunaan Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dalam Rencana Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Pengaruhnya Terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMK Nurul Islam Jakarta” menunjukkan bahwa dana bantuan KJP Plus berpengaruh positif terhadap motivasi belajar para siswa-siswi. Selain itu orang tua sebagai kelompok benefisiari juga merasakan manfaat dan merasa terbantu dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak mereka, salah satunya melalui pembayaran SPP. Jauhari (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Siswa Melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP PLUS)” menyatakan bahwa KJP Plus memberikan manfaat dalam membantu siswa mengakses pendidikan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar sekolah. Melalui KJP Plus juga memberikan peluang bagi siswa kurang mampu untuk bersekolah di sekolah negeri melalui jalur afirmasi.

Penelitian oleh (Abdurrazak et al., 2024) dengan judul “Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara” membahas mengenai KJP Plus yang memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga prasejahtera, yang dilihat dari pemakaian dana untuk kebutuhan pendidikan. Penelitian ini juga membahas mengenai pelaksanaan program yang melibatkan koordinasi baik antara berbagai lembaga terkait contohnya UPT P4OP.

Sari et al., (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Kartu Jakarta Pintar (KJP) Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas XII di SMK Dharma Putra 1 Jakarta”

membahas mengenai program KJP Plus tidak hanya meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung keluarga prasejahtera, namun juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak mereka melalui dukungan finansial dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. Dari keempat penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembahasannya hanya seputar bagaimana KJP Plus sebagai bantuan pendidikan dari pemerintah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, kemudian mengenai orang tua yang merasa terbantu dalam pemenuhan akses pendidikan dan KJP Plus dapat meringankan beban biaya pendidikan anak mereka. Sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana pemanfaatan dana oleh benefisiari KJP Plus yaitu, keluarga perempuan rawan sosial ekonomi dalam menggunakan dana KJP Plus yang telah diberikan setiap bulannya.

Kemudian adapula penelitian oleh Pertiwi & Rengga (2016) pada penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Pada Sekolah Dasar Negeri (SD) di Jakarta Timur Wilayah II, membahas mengenai implementasi KJP Plus yang dinilai masih belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kendala seperti penerima yang tidak tepat sasaran dan kendala teknis yang masih sering dijumpai.

Syahban (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Fenomena “Gadai KJP” Sebagai Penyimpangan di Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan” meneliti bahwa dalam program bantuan KJP Plus terdapat banyak penyalahgunaan yang dilakukan oleh keluarga benefisiari, baik itu dilakukan oleh orang tua siswa maupun siswa tersebut dengan alasan keterdesakan ekonomi.

Penelitian oleh Afriansyah (2017) dengan judul “Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan dalam Pemenuhan Keadilan Sosial di Bidang Pendidikan” menyoroti meskipun KJP Plus memberikan manfaat besar bagi siswa dari keluarga tidak mampu, namun tidak menutup masih adanya kendala, penyalahgunaan dana dan lemahnya pengawasan dari program KJP Plus.

Dari ketiga jurnal tersebut lebih fokus membahas bagaimana KJP Plus masih terdapat banyak kendala yang dapat menyebabkan pada disalahgunakan oleh benefisiari dari bantuan tersebut. Meskipun sudah ada upaya-upaya yang dilakukan

namun hal ini tidak dapat dihindari, oleh sebab itu dibahas juga mengenai rekomendasi dalam implementasi KJP Plus agar tetap sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Berbeda dengan penelitian tersebut, peneliti disini fokus kepada dinamika yang terjadi pada keluarga benefisiari apabila dana bantuan KJP tersebut akan digunakan untuk keperluan lain yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan

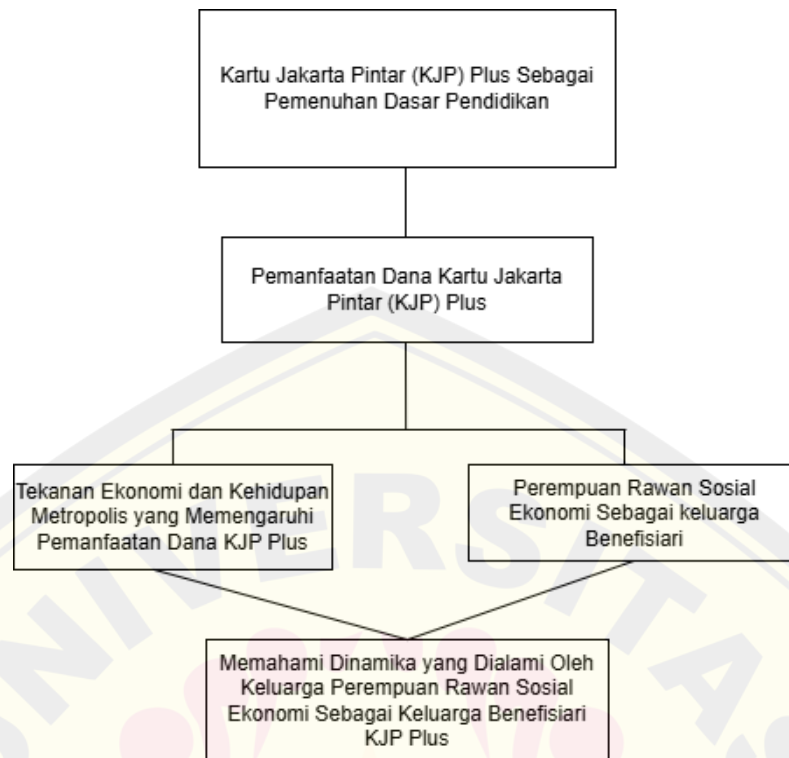
Kemudian Simamora et al., (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “*Hardiness* Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi di Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung” membahas mengenai ketangguhan atau daya tahan (*hardiness*) perempuan rawan sosial ekonomi dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2018) dengan judul “*Coping Strategy* Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Memenuhi Kebutuhan Keluarga di Kampung Adat Cijere, Rancakalong, Sumedang” menyoroti bagaimana strategi coping yang dilakukan perempuan rawan sosial ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Shindy et al., (2022) pada penelitiannya dengan judul “Persepsi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi terhadap Peran Ganda Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga” membahas tentang pandangan dan pengalaman perempuan rawan sosial ekonomi dalam menjalankan peran ganda mereka sebagai pencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga.

Ketiga penelitian ini, sama-sama menyoroti kemampuan adaptif perempuan rawan sosial ekonomi yang sulit, baik dari sisi ketahanan mental, cara mereka mengelola stress, maupun upaya dalam menyeimbangkan tanggung jawab. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, peneliti dalam kajian ini berfokus pada perempuan rawan sosial ekonomi sebagai keluarga benefisiari KJP Plus menghadapi dinamika yang terjadi akibat adanya tekanan ekonomi keluarga, yang nantinya apakah tekanan ekonomi tersebut berpengaruh langsung kepada bagaimana cara mereka memanfaatkan dana yang diperoleh dari program bantuan KJP Plus.

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibuat untuk memahami bagaimana dinamika pemanfaatan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang dialami oleh keluarga perempuan rawan sosial ekonomi sebagai keluarga benefisiari dari program bantuan KJP Plus. Proses berpikir ini dimulai dari temuan fenomena KJP Plus sebagai pemenuhan dasar pendidikan anak-anak di Jakarta. Dari fenomena tersebut, kerangka berpikir berlanjut pada fokus utamanya yaitu pemanfaatan dana KJP Plus. Pemanfaatan dana berdampak pada dua aspek penting, yaitu dinamika dalam pemanfaatan dana KJP Plus, mencakup pengalaman, strategi, gaya hidup dan cara keluarga mengelola dana tersebut. Aspek kedua yaitu aspek perempuan rawan sosial ekonomi sebagai keluarga benefisiari KJP Plus. Pada aspek ini menggambarkan bagaimana kondisi kerentanan mereka memengaruhi cara mereka dalam mengelola dan memanfaatkan dana bantuan KJP Plus.

Kedua aspek ini searah dengan teori psikodinamika untuk memahami dinamika yang dialami oleh keluarga perempuan rawan sosial. Dengan demikian, kerangka berpikir ini dapat menjadi arahan peneliti dalam menganalisis topik penelitian yang dikaji.



*Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir
Diolah oleh peneliti 25 November 2025*

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Creswell (2023) penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang dipakai untuk menggali dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap isu sosial atau kemanusiaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha untuk memahami secara mendalam dinamika dalam pemanfaatan dana bantuan yang dialami oleh keluarga perempuan rawan sosial ekonomi sebagai benefisiari Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Penggunaan pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pemahaman, serta pengalaman dari informan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Kriyantono (2020) dalam (Yusuf & Ismanto, 2024) kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan data secara sistematis, faktual, dan akurat dengan berorientasi pada penggalian makna mendalam di balik fenomena yang diteliti. Moleong (2010) dalam (Pranita et al., 2018) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh. Kemudian, hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk data deskriptif, baik yang berasal dari wawancara maupun sumber tertulis, sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Dalam penelitian ini, studi deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena dinamika pemanfaatan dana KJP Plus oleh keluarga benefisiari pada keluarga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di wilayah Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mendeskripsikan pengalaman, pemanfaatan dana, faktor-faktor yang memengaruhi dan kondisi sosial ekonomi yang melatarbelakangi pengelolaan dana KJP Plus berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.3 Teknik Penentuan Lokasi Penelitian

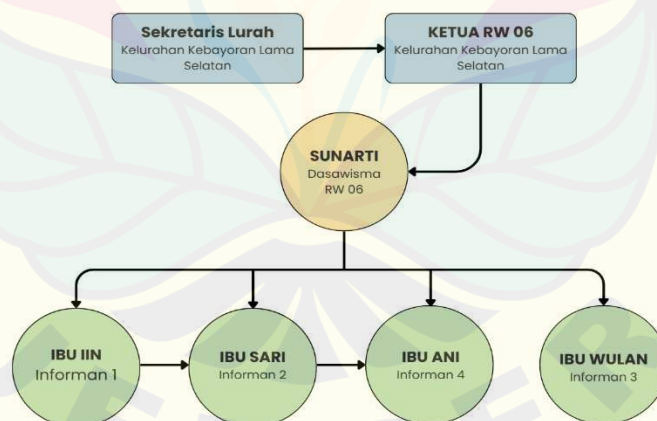
Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive* (bertujuan). Peneliti mengacu pada penjelasan oleh Sugiyono (2023) yang mengatakan *purposive* adalah metode pemilihan sumber data berdasarkan kriteria atau pertimbangan khusus. Dalam hal ini peneliti menetapkan lokasi penelitian akan dilakukan di Kelurahan Kabayoran Lama Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Lokasi ini dipilih berdasarkan pada relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu adanya keluarga perempuan rawan sosial ekonomi yang mengalami dinamika dalam hal pemanfaatan dana bantuan sosial KJP Plus. Situasi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Kabayoran lama Selatan juga dianggap representatif untuk mengkaji fenomena terkait dinamika penggunaan dana KJP antara kebutuhan pendidikan dan tekanan ekonomi keluarga. Hal ini dikarenakan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan memiliki masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang heterogen serta masih ditemukannya keluarga yang mengalami kerentanan sosial ekonomi. Membuat lokasi ini menjadi relevan untuk meneliti terkait dinamika dalam pemanfaatan dana KJP Plus dalam memenuhi kebutuhan pendidikan maupun kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *non probability sampling* dengan metode *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2023) *Snowball sampling* adalah metode pengumpulan sampel sumber data yang dimulai dengan jumlah kecil, kemudian berkembang menjadi lebih besar seiring berjalannya waktu. Proses ini dilakukan karena sampel awal yang terbatas belum dapat menghasilkan data yang memuaskan, sehingga diperlukan sampel tambahan sebagai sumber data baru. Penggunaan teknik *snowball sampling* dalam penelitian ini didasari oleh kriteria subjek penelitian yang sulit diidentifikasi dan dijangkau secara langsung oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini merupakan kelompok yang tidak dapat dikenali hanya dengan melalui pengamatan di lapangan maupun data yang tersedia, sehingga penelitian ini memerlukan pendekatan melalui pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kedekatan, dan kepercayaan dari masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini, proses penentuan informan diawali dengan menghubungi “*key informant*”, yaitu informan kunci yang memiliki otoritas dan dapat dipercaya untuk membantu peneliti mendapatkan akses ke subjek penelitian. Pada penelitian ini, *key informant* tersebut adalah salah satu Kader Dasawisma yang paham dan mengerti tentang keluarga perempuan sosial ekonomi sebagai benefisiari KJP Plus. Dari informan kunci tersebut, peneliti kemudian diarahkan lebih lanjut kepada subjek penelitian dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Perempuan rawan sosial ekonomi yang bertanggung jawab mengelola kebutuhan ekonomi rumah tangga,
- b. Perempuan rawan sosial ekonomi yang memiliki kerentanan sosial dan ekonomi berdasarkan kondisi kehidupannya,
- c. Memiliki anak yang menerima program bantuan KJP Plus minimal 1 tahun terakhir,
- d. Terlibat langsung dalam pengambilan keputusan penggunaan dana KJP Plus,
- e. Bersedia menjadi informan dan mampu menjelaskan pengalaman secara verbal.



Gambar 3. 1 Sosiogram Informan Penelitian
(Sumber : Diolah oleh peneliti 2026)

Penentuan informan yang dilakukan pada penelitian ini, dimulai dengan peneliti yang bertemu Sekretaris Lurah di Kantor Kelurahan Kebayoran Lama Selatan yang kemudian Sekretaris Lurah menunjuk Ketua RW 06 untuk membantu mengarahkan

peneliti kepada target subjek penelitian dengan kriteria yang sudah ada. Setelah itu, Ketua RW 06 menunjuk salah satu Kader Dasawisma yaitu SN, yang dianggap memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial di lingkungan tempat dilakukannya penelitian ini. Dalam penelitian ini, informan SN selaku Kader Dasawisma berperan sebagai *gatekeepers* atau informan awal yang dapat memberikan “jalan masuk” bagi peneliti. Metode *snowball sampling* pada penelitian ini berjalan secara bertahap, dimulai dari SN sebagai *key informan* merekomendasikan ID sebagai informan pertama. Selanjutnya melalui ID, peneliti disarankan untuk melakukan wawancara dengan SR sebagai informan kedua yang dinilai memiliki kondisi yang serupa dengan apa yang ID rasakan. Kemudian, dari informan kedua yaitu SR merekomendasikan peneliti untuk bertemu dengan AN sebagai informan ketiga dalam penelitian ini. Di sisi lain, SN juga secara langsung merekomendasikan informan lain, yaitu WL. Adapun tabel berikut ya berisikan daftar kode informan dalam penelitian ini:

No	Kode Informan	Umur	Pekerjaan
1	SN	51	Kader Dasawisma
2	ID	47	Pekerja lepas (<i>freelancer</i>)
3	SR	43	Karyawan swasta
4	WL	35	Buruh
5	AN	44	Ibu Rumah Tangga

Jumlah informan dalam penelitian ini didasari pada kecukupan dan kedalaman informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Proses penambahan informan dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah mencapai titik jenuh data (*data saturation*). Dengan demikian, kelima informan dinilai tersebut sudah mewakili unit analisis yang dikaji dan memberikan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat dengan topik penelitian yang diangkat, sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Teknik pertama yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah, observasi. Menurut Creswell (2023) observasi kualitatif adalah proses di mana peneliti mencatat perilaku dan kegiatan individu secara langsung di tempat penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan partisipasi pasif (*passive participatory*) yang berarti peneliti berada di lokasi penelitian tanpa terlibat dalam interaksi (aktivitas) atau partisipasi aktif. Dengan observasi memungkinkan peneliti untuk menangkap situasi yang tidak muncul dalam wawancara, seperti pola perilaku dan bisa saja menangkap hambatan yang dialami keluarga benefisiari dalam memanfaatkan dana KJP Plus. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengamati perilaku keempat informan penelitian yaitu ID, SR, WL dan AN yang berkaitan dengan bagaimana interaksi mereka dengan anggota keluarga maupun lingkungan sekitar. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi dengan mengikuti kegiatan informan SR saat berbelanja di pasar yang ada di wilayah Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, yang mana pasar tersebut menjadi tempat yang sering di kunjungi oleh para informan dan warga setempat untuk membelanjakan kebutuhan rumah tangga mereka dengan menggunakan KJP Plus yang mereka punya. Dengan demikian, observasi yang peneliti lakukan tidak hanya bertujuan untuk mengetahui dan memahami perilaku informan, tetapi juga membantu mengungkap keterkaitan antara perilaku informan dengan kondisi sosial yang dapat memengaruhi pola dan cara pemanfaatan dana KJP Plus oleh keluarga benefisiari.

3.5.2 Wawancara

Menurut Creswell (2023) peneliti dapat melakukan wawancara dengan tatap muka (*face to face*) atau melalui telepon dengan partisipan atau melakukan wawancara kelompok dengan enam sampai delapan partisipan. Esterberg (2002) dalam (Sugiyono, 2023) mengemukakan berbagai jenis wawancara, yaitu terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti akan menerapkan teknik wawancara semi terstruktur, karena teknik ini dilakukan dengan

lebih santai dibandingkan wawancara terstruktur. Dengan penggunaan wawancara semi terstruktur ini diharapkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian lebih cepat terungkap. Dalam melakukan wawancara semi terstruktur, peneliti juga perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan (Esterberg (2002) dalam (Sugiyono, 2023)). Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dilaksanakan secara langsung (tatap muka) dengan keempat informan di kediaman masing masing. Wawancara pertama dengan informan ID diadakan pada tanggal 22 Februari 2026 dan wawancara lanjutan diadakan pada 29 April 2026 secara daring (*video call*) untuk memperjelas kembali informasi yang sudah ada sebelumnya dan juga menggali informasi yang belum didapat pada kesempatan wawancara pertama. Wawancara yang dilakukan dengan informan SR dilaksanakan pada 25 Februari 2026, lalu dilanjutkan dengan wawancara bersama informan WL pada 26 Februari 2026, dan wawancara dengan informan terakhir yaitu AN pada 13 Maret 2026. Selama berlangsungnya proses wawancara, peneliti didampingi oleh Kader Dasawisma yaitu SN, pendampingan ini bertujuan untuk membantu memperkuat kepercayaan informan kepada peneliti. Hal ini dikarenakan sebagai seorang Kader Dasawisma tentunya SN memiliki hubungan yang dekat dengan warga sekitar dan memahami dengan baik kondisi sosial serta rutinitas kehidupan informan, sehingga dengan hubungan yang baik tersebut dapat membantu informan merasa lebih nyaman dan terbuka dalam memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Pendampingan yang dilakukan oleh Kader Dasawisma ini juga mengurangi risiko adanya informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga menjadi upaya awal dalam menjaga keabsahan data yang diperoleh peneliti.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen relevan seperti catatan, arsip, rekaman, foto, dan bahan tertulis lainnya (Sugiyono, 2023). Creswell (2023) mengatakan bahwa dokumentasi merupakan sebuah proses pengumpulan data berupa dokumen tertulis, baik publik maupun privat yang berisi catatan atau informasi yang digunakan untuk memahami konteks,

pengalaman, atau aktivitas dari fokus penelitian yang dikaji. Menurut Bogdan dalam (Sugiyono, 2023), kreadibilitas hasil penelitian akan meningkat jika didukung oleh foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud bisa berupa catatan harian, biografi, catatan keuangan atau bukti transaksi, foto atau rekaman visual, dan dokumen lainnya. Pada penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk melengkapi dan juga memperkuat data yang diperoleh di lapangan. Adapun bentuk dokumentasi yang diperoleh selama masa penelitian diantara, rekaman suara dari proses wawancara yang sudah diketahui dan disetujui oleh seluruh informan, rekaman ini digunakan agar data yang diperoleh tetap akurat dan membantu peneliti dalam proses transkripsi serta analisis data penelitian. Selain itu, peneliti juga mengambil foto selama proses wawancara berlangsung sebagai bukti pelaksanaan kegiatan penelitian di lapangan. Peneliti juga melihat dan mendokumentasikan beberapa dokumen yang dimiliki oleh informan terkait dengan program KJP Plus, seperti kartu ATM KJP Plus digunakan untuk mengonfirmasi status informan sebagai penerima manfaat program KJP Plus dan setruks belanja yang masih dimiliki oleh informan sebagai data pendukung untuk mengonfirmasi keterangan informan mengenai pemanfaatan dana KJP Plus. Dengan demikian, dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat memperkuat validitas data melalui bukti-bukti yang mendukung.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan mengorganisir data yang di dapat dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi, dengan cara pengkategorian data, pembagian menjadi unit-unit, melakukan sintesa, penyusunan pola, pemilihan aspek penting, dan pembuatan kesimpulan agar mudah dipahami (Sugiyono, 2023). Penelitian ini menerapkan model analisis data yang di kemukakan oleh Miles & Huberman (2014) meliputi :

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data condensation merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data awal menjadi

data yang lebih teratur dan bermakna. Data yang awalnya sangat luas dan kompleks dibuat lebih sederhana agar peneliti mampu melihat pola, hubungan dan konsep yang relevan dengan penelitian. Data yang ada kemudian dikategorikan oleh peneliti berdasarkan kategori atau tema dan menghapus informasi yang tidak relevan dengan penelitian. Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan proses transkripsi dari hasil wawancara yang sudah dilakukan kepada informan. Hasil transkripsi tersebut kemudian dibaca dengan seksama dan berulang untuk dapat memahami secara mendalam isi dan makna dari data yang diperoleh. Peneliti juga mentransformasikan data melalui proses pengkodean (coding) yang sudah disesuaikan dengan temuan di lapangan. Pengkodean ini bertujuan untuk mengelompokkan data ke berbagai tema seperti pemanfaatan dana KJP, kontrol dan pengelolaan KJP, dilema dalam pemanfaatan dana KJP, dan lainnya, sehingga memudahkan peneliti dalam menemukan pola, hubungan dan informasi penting yang sesuai dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses mengatur hasil reduksi ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami, seperti hasil uraian naratif, table, grafik, maupun matriks. Miles & Huberman (2014) menjelaskan bahwa dengan menampilkan data dalam berbagai bentuk tersebut, peneliti dapat lebih mudah melihat gambaran situasi yang terjadi dan menentukan Langkah analisis atau tindakan berikutnya yang berdasarkan pemahaman tersebut. Pada tahap ini, peneliti menyusun hasil dari transkripsi data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Salah satu cara menampilkan data dengan menggunakan tabel kondensasi data, yang berisi hasil pengkodean dan pengelompokan tema dari data yang sudah dianalisis. Penyajian data dalam bentuk tabel ini bertujuan agar pemahaman terhadap informasi yang didapat menjadi lebih mudah dipahami, sehingga pada tahap selanjutnya yaitu tahap analisis dan penarikan kesimpulan, peneliti dapat melakukan dengan lebih rapih, terarah dan mendalam. Pada tahap penyajian data, peneliti menyusun hasil dari transkripsi data dan penyederhanaan data

menjadi bentuk yang lebih rapih dan terorganisir dengan menggunakan tabel kondensasi data. Hasil dari penyajian data dalam tabel kondensasi tersebut kemudian diperluas menjadi sub bab mengenai hasil temuan penelitian. Sub bab yang disusun mencakup 1.) Gambaran Lokasi Penelitian, yang terdiri dari a) Demografi, dan Kondisi Sosial Masyarakat, b) Deskripsi Informan Penerima Manfaat. Serta 2.) Dinamika Pemanfaatan Dana KJP Plus oleh Keluarga Benefisiari, yang mencakup a) Pemanfaatan Dana KJP Plus untuk Kebutuhan Pendidikan Anak, dan b) Pemanfaatan Dana KJP Plus untuk Kebutuhan Keluarga. Dengan begitu, hasil penelitian bisa disajikan dengan lebih terstruktur dan mudah dipahami.

c. Panarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum terungkap secara jelas. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau penjelasan mengenai suatu objek yang awalnya masih samar atau kurang dapat dipahami, namun menjadi lebih mudah dipahami setelah proses penelitian dilakukan. Peneliti akan melakukan verifikasi temuan melalui triangulasi dan pemeriksaan ulang sumber data. Oleh karena itu, kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa saja menjawab rumusan masalah yang telah disusun sejak awal, tetapi juga memungkinkan tidak terjawabnya rumusan masalah secara sepenuhnya (Miles & Huberman, 2014). Dalam prosesnya, penarikan kesimpulan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga berlangsung sejak tahap awal analisis data. Seperti pada tahap kondensasi, peneliti mulai menyusun kesimpulan awal sementara berdasarkan hasil transkripsi dan pengkodean data. Selanjutnya pada tahap penyajian data, kesimpulan tersebut kembali ditinjau dan diperdalam menyesuaikan hasil temuan di lapangan dan proses analisis. Sehingga pada tahap penarikan kesimpulan akhir, peneliti membuat kesimpulan yang sudah melewati proses verifikasi, dengan hasil yang lebih valid, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan gambaran yang jelas terkait hasil temuan yang sesuai dengan fokus pada penelitian ini.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, suatu temuan atau data dianggap valid apabila apa yang disampaikan oleh peneliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2023). Menurut Sugiyono (2023), uji keabsahan data meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

a. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh peneliti sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pada penelitian ini, peneliti menerapkan sejumlah langkah untuk memperkuat kredibilitas data termasuk penerapan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan melalui perbandingan data dari keempat informan yang menjadi subjek penelitian dan disertai verifikasi langsung oleh Kader Dasawisma di lokasi penelitian ini dilakukan. Keberadaan Kader Dasawisma selama proses wawancara berlangsung menjadi upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam mengurangi risiko adanya data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

b. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Uji transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau dipahami dalam situasi lain. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan informasi tentang lokasi. Menurut Sugiyono (2023), agar hasil penelitian kualitatif dapat dipahami oleh orang lain dan memiliki kemungkinan untuk diterapkan, peneliti harus menyajikan laporan secara rinci, jelas, terstruktur, serta dapat dipercaya. Dengan demikian, pembaca bisa memahami hasil penelitian tersebut dan mengevaluasi apakah temuan penelitian tersebut bisa diterapkan di situasi yang berbeda.

c. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Pada penelitian ini, uji dependabilitas dilakukan dengan memastikan seluruh tahapan penelitian dapat ditelusuri secara jelas dan sistematis. Proses audit dilakukan oleh

pihak dosen pembimbing penelitian dengan meninjau seluruh aktivitas penelitian.

d. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Uji konfirmabilitas bertujuan memastikan bahwa hasil penelitian didasarkan pada data yang diperoleh langsung di lapangan, bukan hanya dari subjektivitas peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mendukung temuan dengan bukti bukti empiris seperti rekaman wawancara, foto kegiatan, serta dokumen pendukung yang dapat menunjang data dari penelitian ini seperti kartu ATM KJP Plus informan dan setruk belanja yang masih disimpan.



BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

4.1.1 Demografi, dan Kondisi Sosial Masyarakat

Kelurahan Kebayoran Lama Selatan merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Secara administratif, kelurahan ini memiliki 12 RW (Rukun Warga) dengan karakteristik masyarakat yang beragam, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Wilayah ini juga didukung oleh berbagai fasilitas umum yang memadai dan menunjang aktivitas warga sehari-hari. Beberapa fasilitas yang terdapat di kelurahan ini antara lain RSUD Kebayoran Lama, kantor Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, sekolah negeri mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA, SD dan SMP swasta, pasar tradisional, serta akses transportasi umum hingga terhubung dengan beberapa halte Transjakarta. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan didominasi oleh kelompok masyarakat menengah kebawah. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan SN bahwa *“Ya mayoritasnya sih untuk ekonomi nya kebanyakan mah, menengah ke bawah ya, yang menengah ke atas kayaknya masih bisa dihitung lah”* (Informan SN, 12 Mei 2026)

Terdapat beberapa wilayah RW yang dikenal sebagai daerah “KUMIS” yaitu kumuh dan miskin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat wilayah-wilayah di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan yang menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi, khususnya terkait kondisi lingkungan pemukiman dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, dari sisi kehidupan sosial masyarakat, hubungan antar warga di kelurahan ini tergolong baik. Masyarakat masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi antar warga. Hal tersebut terlihat dari berbagai kegiatan sosial yang masih aktif dilakukan oleh masyarakat, seperti kerja baik, kegiatan santunan, dan bantuan sosial lainnya.

“Untuk sosial sih alhamdulillah ya. Contoh ya kita umpama ada kerja bakti kita gabisa nyumbang makanan, kita kan dengan tenaga. Ada kegiatan santunan gitu.... insyaallah masih okelah kalau untuk sosial. Untuk kesosialannya, minimal untuk kerja sama, gotong royongnya bagus lah kita ga ada yang saling membeda-bedakan” (Informan SN, 12 Mei 2026)

Selain itu, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan juga menyelenggarakan kegiatan Car Free Day (CFD) setiap satu bulan sekali. Kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana interaksi sosial bagi masyarakatnya, karena warga dapat berkumpul, berolahraga dan mengikuti aktivitas bersama di lingkungan sekitar. Tidak hanya menjadi ruang interaksi sosial, kegiatan CFD juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di lingkungan kelurahan. Melalui kegiatan tersebut, warga dapat memanfaatkan kesempatan untuk berjualan dan mempromosikan produk yang dimiliki sehingga dapat membantu menambah penghasilan masyarakat.

Secara keseluruhan, kondisi demografi dan sosial masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan menunjukkan adanya keberagaman kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan dominasi kelompok menengah ke bawah. Meskipun masih terdapat beberapa wilayah yang menghadapi permasalahan kemiskinan dan kondisi permukiman yang kurang memadai, masyarakat di kelurahan ini tetap memiliki hubungan sosial yang baik dan solidaritas yang kuat antarwarga. Nilai gotong royong, kerja sama, dan kepedulian sosial masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu, berbagai fasilitas umum serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang tersedia turut mendukung aktivitas dan interaksi masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan masih berjalan dengan cukup harmonis di tengah berbagai keterbatasan ekonomi yang dihadapi sebagian warganya.

4.1.2 Gambaran Umum KJP Plus di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan

Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar. Dana KJP Plus pada dasarnya diperuntukkan bagi pembelian

perlengkapan sekolah, seperti seragam, sepatu, tas, alat tulis, buku, serta kebutuhan penunjang pendidikan lainnya, termasuk biaya transportasi dan kebutuhan pendukung proses belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran bantuan yang diterima peserta didik berbeda pada setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/MI penerima memperoleh bantuan sebesar Rp250.000 per bulan, SMP/MTs sebesar Rp300.000 per bulan, SMA/MA sebesar Rp420.000 per bulan, SMK sebesar Rp450.000 per bulan, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebesar Rp300.000 per bulan. Dana bantuan tersebut disalurkan melalui rekening Bank DKI dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan yang telah ditetapkan dalam Program KJP Plus.

Dalam pelaksanaannya, program KJP Plus melibatkan berbagai pihak antara lain Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP), Suku Dinas Pendidikan, Satuan Pelaksana (Satlak) Kecamatan, sekolah, serta Bank DKI sebagai mitra penyalur bantuan. Setiap pihak yang terlibat memiliki peran masing-masing sesuai dengan kewenangannya agar proses penyaluran bantuan dapat berjalan sesuai dengan sasaran program. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Pelaksana (Kasatlak) Kecamatan Kebayoran Lama, pihak kecamatan memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelaras antara kebijakan peraturan program KJP Plus dengan pelaksanaan teknis dan kondisi faktual di lapangan khususnya di wilayah sekolah melalui kegiatan koordinasi, pembinaan kepada pihak sekolah maupun sosialisasi kepada orang tua penerima manfaat KJP Plus.

Pelaksanaan penyaluran KJP Plus dilakukan dalam dua tahap setiap tahunnya. Tahap pertama dilaksanakan pada awal tahun menggunakan data penerima tahap kedua pada tahun sebelumnya (data existing), sedangkan tahap kedua menjadi tahap pembaruan data untuk memverifikasi calon penerima baru maupun tahap evaluasi penerima lama yang kondisi sosial ekonominya telah mengalami perubahan. Saat ini penentuan kelayakan penerima KJP Plus menggunakan basis data dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Apabila masyarakat merasa kondisi ekonomi tidak sesuai dengan klasifikasi yang telah tercantum dalam DTSEN, pemerintah telah menyediakan mekanisme sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos.

“Nah di dalam DTSEN tersebut sosial ekonomi nasional itu jelas mbak. Mereka itu ada di kedudukannya desil berapa. Kalau penerima bantuan sosial umumnya itu berada pada desil 1-5. Ada juga yang lebih kecil. Penerima bantuan sosial itu harus berada di 1-4. Tapi KJP, untuk yang saya tahu sekarang ini menggunakan desil 1-5. Kemudian kalau desil 6-10 itu gak penerima”(Informan M, 20 Februari 2026)

Dalam proses administrasi pengajuan KJP Plus dilakukan melalui sekolah masing-masing dan bukan melalui kelurahan maupun kecamatan. *“Mereka si penerima bantuan sosial KJP itu kan basisnya adanya di sekolah... Jadi kalau dia bersekolah maka mengajukannya melalui sekolah”* (Informan M, 20 Februari 2026). Namun, pihak sekolah masih mengalami kesulitan berupa keterlambatan orang tua dalam melengkapi dokumen persyaratan sehingga proses unggah data oleh Satlak sering mendekati batas waktu yang ditentukan pihak P4OP maupun Dinas Pendidikan. Akibatnya, Satlak perlu melakukan pendampingan langsung ke sekolah agar proses administrasi dapat diselesaikan tepat waktu

“Data existing aja mba, sekolah nguber-nguber. Karena kan prosesnya sama... pengajuan, berkasnya, data-datanya itu kan perlu diambil dari penerima KJP tersebut. Ada penerima KJP itu susah datanya, jadi mereka pengen duitnya tapi berkasnya itu untuk dihajukan itu kurang cepat, kurang memberikan respon” (Informan M, 20 Februari 2026)

Dalam pelaksanaannya, Satlak Kecamatan berperan melakukan monitoring, koordinasi dan evaluasi terhadap implementasi KJP Plus di tingkat sekolah, termasuk menindaklanjuti informasi atau laporan yang diterima dari P4OP. Sementara itu, pengawasan langsung terhadap penerima manfaat dilakukan oleh pihak sekolah yang merupakan institusi yang berinteraksi langsung dengan peserta didik penerima KJP Plus dan memiliki wewenang untuk memantau kepatuhan penerima KJP Plus.

“misalnya peserta KJP itu tawuran, melanggar aturan yang sudah ditetapkan sekolah. Kan ada tuh larangan-larangan di peraturan juga ada tuh larangan-larangan. Ketika dia melakukan hal tersebut, maka biasanya pihak sekolah mengambil langkah mengajukan untuk keputusan ke Sudin melalui Satlak” (Informan M, 20 Februari 2026)

Secara umum, pelaksanaan KJP Plus di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan telah memiliki mekanisme yang terstruktur melalui koordinasi antara P4OP, Suku Dinas Pendidikan, Satlak Kecamatan, Kelurahan, Sekolah dan Bank DKI. Namun, dari

hasil wawancara menunjukkan masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya seperti kendala pembaruan data penerima, keterlambatan pemenuhan administrasi oleh penerima manfaat, serta perlunya pengawasan terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan program KJP Plus.

4.1.3 Deskripsi Informan Penerima Manfaat

Deskripsi informan merupakan bagian penting dalam penelitian ini karena dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik penerima manfaat dari program KJP Plus, khususnya di wilayah administrasi Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan. Deskripsi mengenai informan juga membantu menjelaskan kondisi sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi pengalaman para penerima manfaat dalam memanfaatkan program bantuan tersebut. Adapun gambaran informan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan ID

Informan ID merupakan ibu tunggal berusia 47 tahun yang tinggal bersama tiga orang anak yang masing-masing berusia 24 tahun, 17 tahun, dan 13 tahun. Status sebagai ibu tunggal dijalani sejak suaminya meninggal dunia pada tahun 2022. Sejak saat itu, informan bertanggung jawab penuh dalam mengurus dan memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan pendidikan ketiga anaknya. Dua anak informan yang masih menempuh pendidikan berada pada jenjang SMP, dengan satu anak yang duduk di kelas 3 SMP negeri dan satu anak lainnya yang duduk di kelas 1 SMP swasta. Kondisi tersebut menjadikan informan memiliki tanggung jawab ekonomi yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus biaya pendidikan anak-anaknya.

Saat ini, informan tinggal bersama anak-anaknya di rumah mertua. Kondisi tempat tinggal ID tergolong layak huni karena memiliki ruang tamu, 2 kamar tidur, dan dapur sendiri yang tidak menyatu dengan ruangan lain. Rumah tersebut juga masih memiliki sedikit teras depan dan lantai rumah yang dilapisi oleh keramik. Selain berperan sebagai ibu rumah tangga, informan ID juga bekerja sebagai pekerja lepas (*freelancer*) di bidang administrasi pada agen gas LPG di daerah Kuningan. Pekerjaan tersebut tidak dilakukan setiap hari, melainkan hanya dua hingga tiga kali dalam satu minggu. Penghasilan yang diperoleh berkisar

Rp150.000 – Rp200.000 per hari kerja, sehingga pendapatan tersebut masih berada dibawah Upah Minimum Regional (UMR) jika diakumulasikan dalam satu bulan. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, sehingga dalam beberapa kesempatan ID juga mendapatkan bantuan dari keluarga besarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, dua anak Informan ID yang masih bersekolah juga menerima bantuan pendidikan berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP) sejak jenjang sekolah dasar (SD). Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak-anak agar tetap dapat melanjutkan sekolah di tengah kondisi ekonomi keluarga yang terbatas.

2. Informan SR

Ibu SR berusia 43 tahun dan memiliki tiga orang anak dengan usia masing-masing 24 tahun, 16 tahun, dan 6 tahun. Informan SR berstatus sebagai ibu tunggal sejak suaminya meninggal dunia pada tahun 2022. Sebelum suaminya meninggal, Informan SR tinggal bersama keluarga mertua. Namun, satu tahun setelah kepergian suaminya, ia memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah kos yang berlokasi tidak jauh dari rumah mertuanya. Tempat tinggal Informan SR berupa kamar kos sederhana yang terdiri atas satu kamar tidur, sedangkan fasilitas kamar mandi dan dapur digunakan secara bersama di luar kamar. Meskipun kos tersebut merupakan kos putri, pemilik kos memberikan toleransi kepada Informan SR untuk tinggal bersama kedua anaknya. Dalam satu kamar tersebut, Informan SR tinggal bersama anak kedua dan anak ketiganya, sedangkan anak pertamanya yang telah bekerja tetap tinggal di rumah keluarga mertuanya. Anak kedua SR saat ini masih menempuh pendidikan SMA dan menerima bantuan pendidikan KJP Plus, sedangkan anak bungsunya masih berusia 6 tahun. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Informan SR bekerja di bagian penyediaan makanan di rumah sakit. Penghasilan yang diperoleh berkisar Rp 4.000.000 per bulan. Selama bekerja, informan SR menitipkan anak bungsu kepada tetangga untuk dijaga, sebagai bentuk tanggung jawab akan hal tersebut, informan SR memberikan upah kepada tetangga yang sudah membantu menjaga anaknya tersebut. Meskipun telah memiliki penghasilan tetap, Informan SR menyampaikan bahwa pengeluaran rumah tangga

setiap bulan dapat mencapai sekitar Rp 4.000.000, sehingga kondisi ekonomi keluarga masih tergolong terbatas. Dalam beberapa situasi ketika mengalami kesulitan keuangan, Informan SR juga memperoleh bantuan dari anak sulungnya yang sudah bekerja.

3. Informan WL

Informan WL, usia 35 tahun merupakan ibu tunggal sejak suaminya meninggal dunia pada tahun 2020 dengan meninggalkan dua anaknya yang saat ini berusia 16 dan 13 tahun. Saat ini, Informan WL tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama kedua anaknya, ayah dan ibunya, serta satu saudara perempuannya. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Informan WL bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di salah satu rumah yang berada di dekat tempat tinggalnya. Selain itu, ia juga bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah rumah kos dengan tugas menyapu, mengepel, dan membersihkan lingkungan kos. Dari kedua pekerjaan tersebut, Informan WL memperoleh penghasilan sekitar Rp 2.500.000 per bulan. Sementara itu, pengeluaran rumah tangga setiap bulan bersifat tidak menentu karena disesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Kondisi ekonomi keluarga dijalani secara bersama-sama dengan prinsip saling membantu antaranggota keluarga. Informan WL menjelaskan bahwa kebutuhan sehari-hari, seperti biaya makan, dipenuhi secara bergantian oleh anggota keluarga. Ketika Informan WL mengalami keterbatasan ekonomi, ibunya turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Sedangkan untuk biaya kontrakan rumah, adik informan WL yang membayar tagihan tersebut. Dalam bidang pendidikan, kedua anak Informan WL menerima bantuan pendidikan berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. WL menyampaikan bahwa bantuan tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya, dan kedua anak WL juga dapat bersekolah di sekolah negeri melalui jalur afirmasi bagi penerima KJP Plus. Tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pendidikan, Informan WL juga terkadang memanfaatkan dana bantuan KJP untuk membantu memenuhi kebutuhan makanan keluarga sehari-hari.

4. Informan AN

Informan AN merupakan seorang perempuan berusia 44 tahun yang tinggal di rumah kontrakan bersama kelima anaknya. Berbeda dengan informan sebelumnya, Informan AN masih memiliki suami, namun hubungan rumah tangga yang kurang harmonis menyebabkan suaminya jarang pulang. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari Informan AN lebih banyak menjalankan peran sebagai orang tua tunggal dalam mengurus dan membesarkan anak-anaknya. Informan AN memiliki lima anak yang masing-masing berusia 20 tahun, 17 tahun, 10 tahun, 8 tahun, dan 4 tahun. Anak sulungnya telah menyelesaikan pendidikan, tetapi saat ini belum memiliki pekerjaan. Sementara itu, tiga anak lainnya yang masih menempuh pendidikan berada di kelas 1 SMA, kelas 3 SD, dan kelas 1 SD. Ketiga anak tersebut menerima bantuan pendidikan KJP Plus untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sekolah mereka. Dalam aspek ekonomi, Informan AN tidak memiliki pekerjaan tetap karena lebih banyak berfokus pada pengasuhan anak-anaknya di rumah, terutama karena jumlah anak yang cukup banyak dan masih membutuhkan perhatian penuh. Oleh sebab itu, kebutuhan sehari-hari keluarga sebagian besar bergantung pada penghasilan suaminya yang bekerja serabutan. Namun, pendapatan yang diberikan suami tidak selalu tetap karena suaminya hanya memberikan uang ketika memiliki penghasilan. Kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil membuat Informan AN terkadang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam situasi tertentu, Informan AN mengaku harus berutang di warung maupun kepada tetangga sekitar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan keberlangsungan kebutuhan keluarga ketika tidak memiliki cukup uang. Meskipun demikian, Informan AN menyampaikan bahwa bantuan KJP sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Bantuan tersebut meringankan beban pengeluaran keluarga, khususnya untuk kebutuhan sekolah, sehingga anak-anaknya tetap dapat melanjutkan pendidikan di tengah kondisi ekonomi yang terbatas dan tidak menentu.

4.2 Dinamika Pemanfaatan Dana KJP Plus oleh Keluarga Benefisiari

Dinamika adalah suatu sistem hubungan yang saling terkait dan saling memengaruhi antara unsur-unsur di dalamnya. Jika salah satu unsur sistem mengalami perubahan, maka akan membawa perubahan pula pada unsur-unsur lainnya (Munir (2001:16) dalam (Aditama, 2019)). Dinamika dalam konteks penelitian ini dapat diartikan sebagai proses, perubahan dan pertimbangan yang terjadi oleh keluarga penerima manfaat dalam hal pemanfaatan bantuan KJP Plus yang mereka terima. Program KJP Plus bertujuan untuk membantu memberikan dana pendidikan kepada keluarga kurang mampu agar dapat mengakses layanan pendidikan secara merata, minimal sampai tamat SMA/SMK, mencegah putus sekolah, serta mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan siswa di DKI Jakarta. Namun dalam realitasnya, sebagaimana hasil kajian menunjukkan bahwa KJP Plus tidak hanya dimanfaatkan sebagai dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak tetapi juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari sebagai upaya untuk keluarga benefisiari bertahan hidup. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa bentuk pemanfaatan KJP Plus oleh keluarga benefisiari, yaitu untuk kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan anak dan juga pemanfaatan dana KJP plus untuk kebutuhan keluarga benefisiari yang tidak berkaitan dengan kebutuhan pendidikan anak. Pembahasan mengenai hasil kajian tersebut dijelaskan dalam sub bab dibawah ini:

4.2.1 Pemanfaatan Dana KJP Plus untuk Kebutuhan Pendidikan Anak

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus merupakan program bantuan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sekolah peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan ketentuan penggunaan dana KJP Plus, dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, seperti buku, alat tulis, sepatu, serta kebutuhan pendukung lainnya, seperti transportasi, makanan bergizi, dan biaya penunjang pendidikan lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 4 perempuan rawan sosial ekonomi sebagai keluarga benefisiari yang menjadi subjek penelitian ini, salah satu informan, yaitu ID, mengatakan bahwa bantuan program KJP Plus yang diterimanya sangat membantu dalam memenuhi biaya pendidikan, khususnya pembayaran SPP sekolah. Ia memiliki 2

anak yang masih bersekolah di jenjang SMP, dengan salah satu anak bersekolah di SMP swasta dengan biaya SPP Rp. 500.000/bulan. Meskipun KJP Plus hanya membantu membayar SPP Rp. 170.000, sedangkan sisanya yaitu Rp. 330.000, informan ID bayar menggunakan uang pribadinya. Informan ID mengatakan:

“...sangat membantu sih karena program kjp itu kan sebagian buat spp yahh. ada ada ibaratnya ada tarif buat biaya spp sekian dari kjp itu. ya sangat membantu sekali gitu” (Informan ID, 22 Februari 2026)

Artinya, dari yang disampaikan oleh informan ID, bahwa dana KJP Plus memberikan kontribusi yang berarti bagi keluarga mereka dalam meringankan beban biaya pendidikan. Bantuan ini dinilai efektif dalam membantu orang tua murid memenuhi tanggung jawab mereka untuk membayar sekolah dan menjaga kelangsungan pendidikan anak. Selain digunakan untuk pemenuhan biaya pendidikan, dana KJP Plus juga dimanfaatkan oleh keluarga benefisiari untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan perlengkapan sekolah anak. Beberapa informan menyatakan:

“kadang seragam, kadang sepatu gitu. kadang kebutuhan itu belanja” (Informan ID, 22 Februari 2026)

“peralatan sekolah anak. jadi beli seragam beli buku beli sepatu itu bisa pake kjp semua.... sepatu gitu kan, sepatu, buku sama seragam gitu kan” (Informan SR, 25 Februari 2026)

“langsung belanja keperluan anak anak sekolah beli tas, beli sepatu.... Iya seragam, sepatu terus kadang pulpen gitu kan kalau di toko-toko pasar sekarang kan peralatan sekolah bisa digesek pakai itu. gitu sih rata-rata misalkan perlengkapan Pramuka semuanya bisa” (Informan WL, 26 Februari 2026)

“Ya buat keperluan anak-anak sekolah aja sih sebenarnya... kayak “mamah beli sepatu mah beli tas mah” “iyaa” gitu” (Informan AN, 13 Maret 2026)

Pernyataan yang disampaikan oleh keempat informan, menunjukkan bahwa keluarga benefisiari KJP Plus memanfaatkan dana yang mereka terima untuk memenuhi berbagai kebutuhan perlengkapan sekolah anak, termasuk seragam, sepatu, tas, buku, alat tulis, hingga perlengkapan kegiatan sekolah seperti atribut Pramuka. Pemanfaatan dana ini menggambarkan bahwa bantuan KJP Plus tidak hanya meringankan biaya administrasi sekolah, tetapi juga membantu orang tua dalam menyediakan kebutuhan pendidikan sehari-hari anaknya. Dari pernyataan

para informan, juga dapat dipahami bahwa bantuan dana KJP Plus mencegah kekurangan perlengkapan sekolah pada anak. Kebutuhan seperti seragam, sepatu, alat tulis, dan tas sekolah menjadi penting karena berkaitan dengan kenyamanan dan kepercayaan diri anak saat mengikuti kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Selain itu, para informan juga menyatakan bahwa sekolah saat ini cukup memperhatikan kondisi perlengkapan siswa penerima KJP Plus. Anak-anak penerima bantuan KJP Plus, diharapkan dapat hadir di sekolah dengan perlengkapan sekolah yang layak karena telah memperoleh bantuan pendidikan dari pemerintah. Pada beberapa kasus, orang tua anak penerima bantuan KJP Plus dapat dipanggil oleh pihak sekolah apabila anak masih menggunakan seragam dan perlengkapan sekolah yang sudah tidak layak, seperti seragam yang sudah lusuh, sepatu kekecilan atau rusak, tas yang tidak layak, hingga perlengkapan sekolah yang tidak lengkap. Kondisi ini membuat orang tua merasa memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menggunakan dana bantuan secara tepat sesuai dengan tujuan dan fungsinya yaitu sebagai penunjang kebutuhan sekolah anak. Orang tua menjadi lebih memperhatikan kelengkapan dan kondisi anak agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar dengan nyaman dan tidak merasa tertinggal dengan teman-temannya di sekolah.

Selain digunakan untuk memenuhi perlengkapan sekolah, dana KJP Plus juga dimanfaatkan untuk membantu biaya transportasi dan uang saku anak selama bersekolah. Seperti yang dikatakan oleh:

“100 itu kita pergunakan buat ongkos jajannya dia lah, transport nya lah ibaratnya” (Informan ID, 22 Februari 2026)

“aku ambil buat ongkosnya si anak” (Informan SR, 25 Februari 2026)

“Ya paling, buat jajan anak sekolah” (Informan WL, 26 Februari 2026)

“buat transport ya, jajan anak, terus kalau yang gede kan emang biayanya udah gede juga” (Informan AN, 13 Maret 2026)

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa keempat informan dalam penelitian ini memanfaatkan dana KJP Plus yang mereka terima untuk menunjang kebutuhan operasional sekolah anak sehari-hari. Selain untuk transportasi, sebagian dana KJP Plus juga digunakan oleh orang tua untuk uang saku anak mereka. Dari hasil wawancara, uang tunai atau KJP Plus disebutnya dengan “uang personal” hanya

bisa diambil Rp100.000 per bulan. Umumnya, uang personal tersebut dialokasikan oleh orang tua untuk uang saku anak. Namun, dalam praktiknya, dana KJP Plus tidak sepenuhnya mencukupi biaya transportasi dan uang saku anak. Orang tua masih perlu menambahkan dari pendapatan pribadi mereka karena kebutuhan transportasi dan uang saku anak sering kali melebihi besaran bantuan yang mereka terima. Saat ini, meskipun beberapa anak telah memperoleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah, orang tua merasa perlu membekali anak dengan uang saku untuk berjaga-jaga apabila anak membutuhkan sesuatu selama berada di sekolah. Kehadiran program MBG juga semakin meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya makanan bergizi untuk menunjang kesehatan dan proses belajar anak. Melalui dana bantuan KJP Plus yang mereka terima, orang tua berupaya memenuhi kebutuhan makanan bergizi anak di rumah. Hal ini terlihat dari pernyataan beberapa informan yang menyatakan bahwa dana KJP Plus juga digunakan untuk membeli susu dan vitamin anak, sebagaimana informasi informan yaitu *“iya buat gizi anak”* (Informan ID, 22 Februari 2026). Informan ID menyatakan bahwa biasanya dana KJP Plus yang ia terima tiap bulannya juga selalu ia sisihkan untuk membeli kebutuhan gizi anak seperti susu dan makanan bergizi lainnya. Sama seperti Informan ID, informan SR juga mengatakan bahwa *“untuk kebutuhan dia kaya susu gitu kan. susu dancow gitu kan setiap ini, vitamin.”* (Informan SR, 25 Februari 2026). Informan SR memanfaatkan dana KJP Plus untuk memprioritaskan kebutuhan anak dan juga penunjang gizi anak seperti susu dan vitamin. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan tersebut biasanya dibeli melalui program tebus pangan murah yang disediakan oleh pemerintah. Namun, karena saat ini akses terhadap program tebus pangan murah semakin terbatas dan tidak selalu tersedia, informan SR memilih membeli di warung atau agen terdekat agar kebutuhan anak akan susu dan vitamin tetap terpenuhi.

Selain digunakan untuk perlengkapan sekolah, transportasi dan kebutuhan gizi anak, dana KJP Plus juga dialokasikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan penunjang pembelajaran lainnya. Informan WL menyampaikan bahwa dana KJP plus juga biasanya digunakan untuk membeli paket data internet sebagai penunjang pembelajaran anak yang saat ini semakin bergantung pada penggunaan teknologi

dan digital, biaya mencetak tugas, hingga digunakan untuk kebutuhan prakarya atau tugas sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan bahwa *“He’eh untuk paket data, ngeprint terus kadang mah ada prakarya ini ada prakarya ini gitu.”* (Informan WL, 26 Februari 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pendidikan anak saat ini tidak terbatas pada perlengkapan dasar seperti buku dan seragam, melainkan juga mencakup keperluan pendukung pembelajaran yang muncul selama proses belajar-mengajar di sekolah.

Selanjutnya, informan AN juga menyampaikan bahwa dana KJP Plus digunakan untuk membayar iuran sekolah yang muncul selama anak bersekolah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan bahwa *“Biar kata sekolahnya gratis, di sekolah tetep aja ada namanya... Iuran ini iuran itu yakan.... Alhamdulillah ada KJP tadinya ga pegang uang, KJP cair ada keperluan di sekolah ya, kayak buat inian guru”* (Informan AN, 13 Maret 2026). Informan AN menjelaskan bahwa iuran tersebut biasanya berkaitan dengan kegiatan sekolah, seperti peringatan hari ulang tahun sekolah maupun pemberian buah tangan untuk guru. Dalam praktiknya, AN menjelaskan bahwa pembayaran iuran tersebut dilakukan menggunakan dana KJP Plus yang terlebih dahulu dilakukan gesek tunai melalui agen yang menyediakan jasa penukaran saldo KJP Plus menjadi uang tunai.

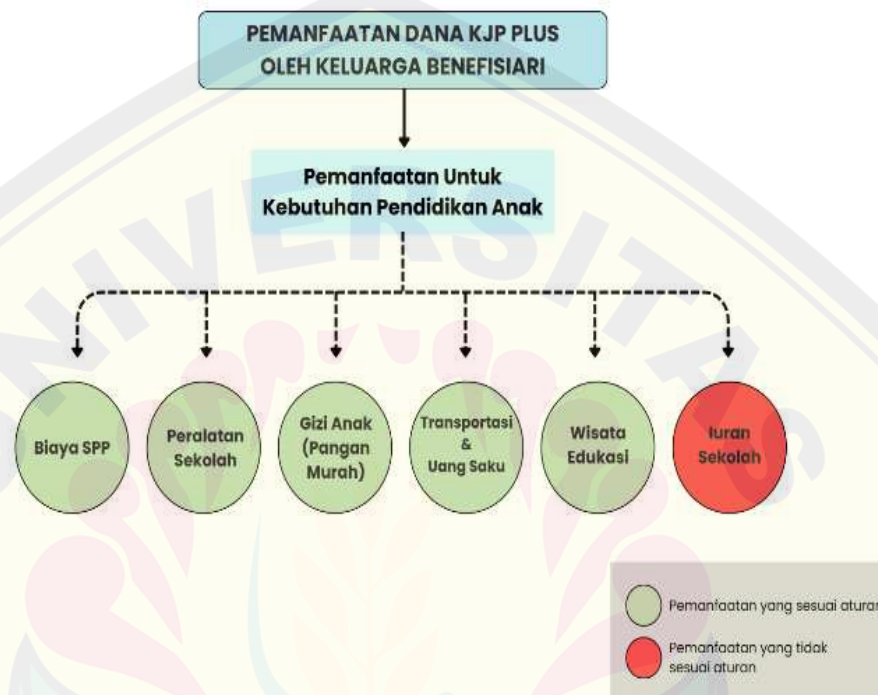
Penggunaan KJP Plus untuk kebutuhan tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan dana bantuan KJP Plus. Selain itu, praktik pungutan di sekolah negeri pada dasarnya juga tidak diperbolehkan apabila sifatnya memberatkan orang tua siswa. Sebagai ibu rumah tangga, dengan tiga orang anak penerima KJP Plus, penggunaan dana tersebut dianggap masih berkaitan dengan kepentingan pendidikan anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, keluarga benefisiari terkadang menggunakan dana KJP Plus secara fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan anak di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut juga menggambarkan adanya tekanan sosial yang dirasakan orang tua agar anak tetap dapat mengikuti berbagai kegiatan sekolah bersama teman-temannya tanpa merasa berbeda atau tertinggal akibat faktor ekonomi keluarga yang terbatas. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Maslow (1943) dalam Yuliana (2018) melalui teori hierarki kebutuhan, bahwa manusia tidak hanya membutuhkan kebutuhan

fisiologis dan keamanan, tetapi juga kebutuhan sosial (*social need*) yang berkaitan dengan bagaimana interaksi sosial dan penerimaan dari lingkungan. Hasil temuan juga searah dengan riset dari Pertiwi & Rengga (2016) yang menyatakan bahwa rendahnya pengawasan sekolah terhadap bukti pembelanjaan sebagai alat kontrol penggunaan KJP Plus serta lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan membuat pemanfaatan dana menjadi kurang terarah. Dengan adanya iuran yang dibebankan kepada orang tua mendorong keluarga penerima KJP Plus untuk menarik dana secara tunai untuk melunasi iuran sekolah yang dibebankan kepada orang tua murid.

Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok pendidikan, dana dan fasilitas KJP Plus juga dimanfaatkan oleh penerima manfaat untuk kegiatan wisata edukasi bagi anak-anak. Informan SR menyampaikan bahwa dirinya pernah memanfaatkan KJP Plus untuk mengunjungi beberapa tempat wisata edukatif di Jakarta bersama anaknya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan bahwa *“Ke ragunan pernah. Ke ragunan sekali, pake kjp. Kalo di monas pernah sekali, tapi kalo... kalo trans pernah kalo lainnya engga”* (Informan Sari, 25 Februari 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa SR memanfaatkan fasilitas KJP Plus yang memberikan akses ke beberapa tempat wisata edukatif serta transportasi umum di Jakarta. Sesuai dengan ketentuan program KJP Plus, penerima bantuan diperbolehkan menggunakan KJP Plus yang mereka punya untuk mengakses sejumlah museum, tempat wisata edukasi dan transportasi publik tertentu di wilayah DKI Jakarta. Bagi informan SR, fasilitas tersebut dimanfaatkan sebagai kesempatan agar anak dapat berjalan-jalan sekaligus memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru di luar lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemprov DKI Jakarta dalam Rowe (2025) yang menjelaskan bahwa pemegang KJP Plus mendapatkan fasilitas gratis untuk masuk kebeberapa museum yang ada di Jakarta. Kebijakan tersebut memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih beragam dan memperkaya wawasan serta pengetahuan di luar lingkungan sekolah. Hal ini juga searah dengan pendapat dari Sari et al., (2020) yang menyatakan bahwa adanya bantuan KJP Plus tidak hanya berfungsi untuk meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh keluarga prasejahtera,

namun juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak mereka melalui dukungan finansial dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan.

Pemanfaatan KJP Plus dapat digambarkan sebagaimana terlihat dalam bagan dibawah ini:



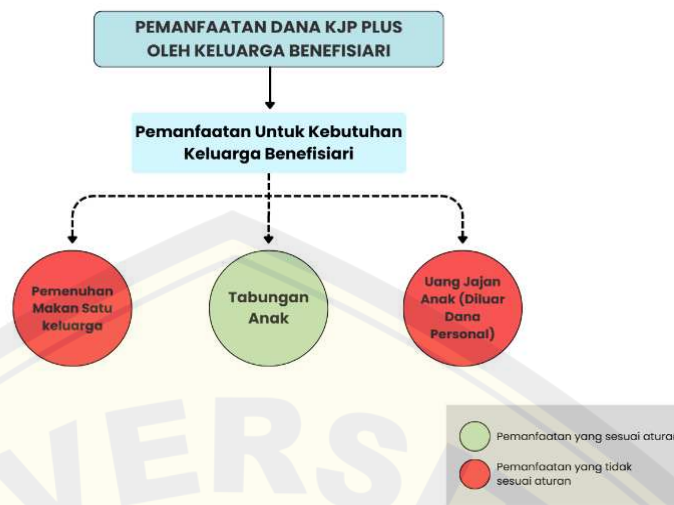
*Gambar 4. 1 Pemanfaatan kebutuhan pendidikan anak
(Sumber: Diolah oleh peneliti 2026)*

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa keluarga benefisiari program KJP Plus memanfaatkan dana yang mereka terima untuk memenuhi beragam kebutuhan dan pendukung pendidikan anak. Dana tersebut tidak hanya dialokasikan untuk biaya sekolah dan perlengkapan sekolah, tetapi juga difungsikan untuk membantu biaya transportasi, uang saku, paket internet, pemenuhan kebutuhan gizi anak, pemanfaatan akses ke wisata edukasi anak hingga di gunakan untuk membayar iuran sekolah yang mana hal tersebut merupakan contoh pemanfaatan dana KJP Plus yang disalahgunakan oleh keluarga benefisiari. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya, orang tua berupaya menyesuaikan penggunaan dana KJP plus dengan kebutuhan yang benar-

benar diperlukan oleh anak. Kebutuhan sekolah yang terus berkembang dan berubah-ubah mendorong orang tua untuk memanfaatkan bantuan ini secara fleksibel untuk memastikan seluruh kebutuhan pendidikan anak terpenuhi dan juga bantuan yang sudah diberikan dimanfaatkan dengan baik oleh mereka sebagai keluarga benefisiari.

4.2.2 Pemanfaatan Dana KJP Plus untuk Kebutuhan Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa pemanfaatan dana KJP Plus oleh keluarga benefisiari tidak hanya berfokus pada kebutuhan pendidikan anak saja, melainkan juga dana KJP Plus dinilai membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga penerimanya. Kondisi ini tidak lepas dari latar belakang para informan yang termasuk dalam kelompok perempuan rawan sosial ekonomi, yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Keempat informan merupakan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan anak dan keluarga mereka, baik sebagai orang tua tunggal maupun sebagai tulang punggung keluarga. Sebagai perempuan yang rentan secara sosial-ekonomi dan juga memiliki peran ganda sebagai orang tua tunggal sekaligus pencari nafkah dalam keluarga, para informan menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang, dengan kondisi ekonomi yang rentan dan tingginya kebutuhan yang harus dipenuhi, mereka menunjukkan ketahanan yang kuat dalam menjalankan perannya. Ketahanan tersebut tidak hanya terlihat dari kemampuan bertahan hidup, tetapi juga dari upaya dan strategi mereka dalam mengelola sumber daya yang terbatas (Amelia et al., 2024). Dengan adanya situasi tersebut, tidak hanya kebutuhan pendidikan anak, tetapi juga kebutuhan dasar keluarga perlu mereka penuhi tiap harinya. Oleh karena itu, dana bantuan dari program KJP yang diterima oleh keluarga benefisiari tidak hanya dipandang sebagai bantuan pendidikan, tetapi juga mereka manfaatkan sebagai bantuan yang dapat membantu mereka dalam mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.



Gambar 4. 2 Pemanfaatan kebutuhan keluarga
(Sumber: Diolah oleh peneliti 2026)

Selain dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan anak, KJP Plus juga dimanfaatkan oleh informan SR sebagai tabungan untuk kebutuhan anak di masa mendatang. Informan SR menjelaskan bahwa apabila dana KJP Plus tidak sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan sekolah, maka dana tersebut akan disimpan ke dalam rekening bank milik anaknya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan bahwa “.... udah diplanning sih jadi sebagian tuh ditabung. Pengennya, pengen nya sih aku sebaiknya ditabung buat nanti apanya dia, gitu sih.. aku sih pengen nya gitu” (Informan SR, 25 Februari 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan SR memiliki perencanaan yang baik dalam mengelola dana bantuan KJP Plus. Sisa saldo yang ada diputuskan untuk disimpan sebagai tabungan anak dibandingkan digunakan untuk kebutuhan lain diluar dari kepentingan pendidikan anak. Langkah tersebut dilakukan juga sebagai upaya agar dana bantuan yang diberikan tetap dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program KJP Plus. Lebih lanjut, informan SR juga menyampaikan bahwa dirinya memahami bahwa bantuan KJP Plus merupakan hak anak yang harus digunakan dengan bijak dan perlu dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan bahwa:

“Karna aku tau ini kan hak anak gitu, aku ga mau dzolim gitu kan... maksudnya eee hak anak... ya gitu lahh... jadi memang kalo masalah lain itu yang sudah jadi tanggung jawab saya kalo masalah kjp sudah hak nya dia. jadi kalo pun itu mau dipake ya aku ijin dulu sama anaknya gitu....”
(Informan SR, 25 Februari 2026)

Informan SR juga menerapkan sikap terbuka kepada anak terkait penggunaan dana KJP Plus. Setiap transaksi atau penggunaan dana bantuan selalu disampaikan kepada anak agar anak mengetahui dana bantuan KJP Plus yang diterimanya digunakan untuk apa saja. Sikap transparansi tersebut menunjukkan adanya upaya orang tua dalam mengajarkan tanggung jawab serta keterbukaan dalam pengelolaan bantuan pendidikan yang diterima anak. Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa keluarga merupakan lingkungan awal dalam pembentukan nilai integritas anak. Keteladanan orang tua dalam bersikap jujur, mematuhi aturan, serta membangun komunikasi terbuka mengenai nilai moral dapat membantu anak memahami pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan etika sosial dalam kehidupan sehari-hari (Nursalim et al., 2025). Jika dibandingkan dengan informan lainnya, SR merupakan satu-satunya informan yang memiliki pendapatan tetap setiap bulannya sehingga pemasukan dan pengeluaran rumah tangga cenderung lebih stabil dan tekanan ekonomi yang dialami SR cenderung lebih rendah dari pada ketiga informan lainnya. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kondisi ekonomi keluarga dapat memengaruhi bagaimana pola pemanfaatan bantuan KJP Plus pada masing-masing keluarga beneficiari.

Berbeda dengan informan SR yang cenderung memanfaatkan dana KJP Plus untuk kebutuhan anak dan sesuai dengan peraturan penggunaan bantuan KJP Plus, informan ID memanfaatkan dana KJP Plus secara lebih fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi keluarganya sehari-hari. Kondisi tersebut tidak terlepas dari situasi ekonomi ID sebagai ibu tunggal yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam kondisi pendapatan yang tidak menentu, dana KJP Plus juga digunakan oleh ID untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sehari-hari. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan bahwa;

“selebihnya itu kita buat kebutuhan kaya sembako.. apa... pangan murah kita ambil gituu. Ibaratnya dari pendidikannya terus bisa bantu bantu biaya.. biaya yang kaya keperluan dapur nya juga” (Informan ID, 22 Februari 2026)

Melalui pemanfaatan dana KJP Plus untuk keperluan dapur keluarga, pengeluaran pribadi yang harus ID keluarkan menjadi sedikit berkurang. Informan ID juga mengakui bahwa dirinya beberapa kali melakukan pencairan saldo atau “gesek tunai” terhadap dana KJP Plus yang ia miliki. Namun, tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya bertahan ketika dirinya berada dalam kondisi tertekan untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya.



Gambar 4. 3 Struk pencairan tunai informan ID

Bagi ID, penggunaan dana KJP Plus untuk kebutuhan yang tidak berkaitan dengan pendidikan anak dan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan tetap dianggap sebagai upaya ID untuk meringankan beban tanggung jawabnya sebagai orang tua tunggal. Cara tersebut juga dapat membantu memenuhi kebutuhannya sehari-hari tanpa terlalu memikirkan pengeluaran dari uang pribadi yang dimilikinya. Sebagai pekerja lepas dengan pendapatan yang tidak menentu, informan ID memanfaatkan dana KJP Plus yang dianggapnya sudah diberikan kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhan yang dihadapi saat itu, sementara untuk kebutuhan bulan berikutnya dirinya kembali berupaya mencari penghasilan lain. Namun, ketika kondisi ekonomi sedang sulit dan penghasilan belum juga tersedia, ID mengakui

bahwa dirinya kembali mengandalkan dana KJP Plus anak-anaknya sebagai cara agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi.

Kondisi yang hampir serupa juga ditemukan pada informan WL. Sama seperti informan ID, WL tidak hanya memanfaatkan dana KJP Plus untuk kebutuhan pendidikan anak, tetapi juga untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang tidak langsung terkait dengan pendidikan. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah dengan menggunakan dana KJP Plus untuk kebutuhan belanja dapur dan kebutuhan makan keluarga. Informan WL juga menyampaikan:

“Nanggepinnya.. ya bener juga sih maksudnya gitu kalau kebutuhan sekolah kan nggak semuanya tiap bulan harus diganti kan, nggak setiap bulan harus ada yang dibeli tapi kan anak butuh makan juga ya kadang-kadang dapat dari situ juga... ngebantu banget sih. Kadang kita tarik tunai itu buat beli ke pasar, nggak harus tarik tunai buat beli kebutuhan yang nugget gitu-gitu kan... emang nggak pakai minyak goreng nggak pakai beras hehehe kan gitu” (Informan WL, 26 Februari 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, kebutuhan sekolah anak tidak selalu muncul setiap bulan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, ketika tidak ada kebutuhan pendidikan yang mendesak, dana KJP Plus kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap lebih penting dan mendesak, yaitu kebutuhan makan keluarga sehari-hari.

Kondisi ini berkaitan dengan situasi keluarga WL yang tinggal bersama kedua anaknya, orang tua, serta adiknya dalam satu rumah. Jumlah anggota keluarga yang cukup banyak membuat kebutuhan konsumsi rumah tangga menjadi lebih besar, sehingga pengeluaran untuk kebutuhan makan sehari-hari juga meningkat. Namun, di sisi lain, informan WL juga mengungkapkan adanya perasaan bingung dan tertekan ketika harus menentukan prioritas pemanfaatan dana dari bantuan KJP Plus yang diterima. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan bahwa;

“Ya sedih aja gitu bingung nih antara sekolah dulu apa ini dulu, sedangkan... ya kadang bingung juga uang segini kadang kan aku kan juga belum gajiian apa segala macam ya” (Informan WL, 26 Februari 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keluarga penerima manfaat sering kali berada dalam situasi yang mengharuskan mereka menentukan prioritas kebutuhan berdasarkan kondisi yang paling mendesak. Hal tersebut sejalan dengan konsep pengambilan keputusan oleh Herbert A. Simon, di mana pada tahap *intelligence activity*, keluarga perlu mengenali dan memahami kondisi ekonomi yang sedang dihadapkan secara objektif, seperti adanya kebutuhan mendesak atau ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran (Hakim et al., 2021). Situasi tersebut membuat WL harus terus mempertimbangkan dan memilih kebutuhan mana yang dianggap paling mendesak untuk dipenuhi terlebih dahulu. WL juga mengungkapkan bahwa keberadaan bantuan KJP Plus membuat dirinya merasa khawatir akan munculnya ketergantungan terhadap bantuan tersebut dalam kehidupan keluarganya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan bahwa *“Ya takut ketergantungan sih, karena semua apa apa itu pake KJP ya sekarang rata-rata kalo sampe ga ada kayanya berat banget gitu hehehe...”* (Informan WL, 26 Februari 2026). Kondisi ini sejalan dengan teori ketergantungan (*welfare dependency*) yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diberikan secara terus-menerus dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan efek penggantian pendapatan. Artinya, bantuan yang diterima secara perlahan dapat mengambil peran sebagai sumber pemenuhan kebutuhan keluarga sehingga penerima manfaat menjadi kurang termotivasi untuk mencari sumber pendapatan yang lebih baik (Novindra et al., 2019 dalam Wahyudi et al., 2026).

Dalam kehidupan sehari-hari, bantuan dana KJP Plus telah menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan keluarga WL. Kebutuhan keluarga selama ini terbantu melalui dana KJP Plus, yang membuat penerima manfaat khawatir apabila suatu saat bantuan tersebut tidak lagi diberikan. Perasaan takut ketergantungan tersebut juga dipengaruhi oleh pengalaman WL ketika dana KJP Plus salah satu anaknya tidak cair selama 8 bulan. Kondisi tersebut membuat WL cukup kesulitan dalam mengatur kebutuhan dan pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Selama ini dana KJP Plus dari kedua anaknya menjadi salah satu sumber bantuan yang membantu memenuhi berbagai kebutuhan keluarga, sehingga ketika salah satu bantuan tersebut tidak cair, kondisi keuangan keluarga menjadi lebih berat

dibandingkan biasanya. Pengeluaran rumah tangga yang sebelumnya sedikit terbantu oleh dana KJP Plus, harus kembali ditutupi menggunakan pendapatan pribadi yang jumlahnya tidak selalu stabil.

Kondisi yang lebih berat juga dialami oleh informan AN. Sama seperti informan lainnya, AN juga memanfaatkan dana KJP Plus anak-anaknya tidak hanya untuk keperluan pendidikan, tetapi juga untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. AN menyampaikan:

“Paling buat belanja di warung, kayak gitu buat belinya telur, kayak gitu... yang buat sehari-hari makannya, kayak gitu... Pasti buat kayak kebutuhan pribadi gitu ya, kayak buat nginiin dapur, buat belanja, ini itulah namanya” (Informan AN, 13 Maret 2026).

Kondisi tersebut tidak lepas dari situasi keluarga AN yang cukup rentan secara ekonomi. Dengan ketidakhadiran sosok suami, AN harus berusaha sendiri mengatur kebutuhan hingga pengeluaran rumah tangga dan anak-anaknya. Selain itu, banyaknya jumlah tanggungan, yaitu kelima anaknya membuat kebutuhan menjadi lebih besar, sementara dirinya juga tidak memiliki pilihan untuk bekerja karena harus mengurus anak-anaknya yang masih kecil. Selama ini, kebutuhan keluarga sebagian besar hanya bergantung pada uang kiriman suami yang jumlah dan waktunya tidak menentu. Dalam kondisi tersebut, dana KJP Plus milik ketiga anaknya kemudian menjadi sumber bantuan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. AN juga menjelaskan bahwa:

“Kepikiran kesitu memang ada ya pasti, yang namanya aturan kan, misalnya itu. Ya tapi mau diapain lagi? Terus misalnya kayak buat keperluan sekolah, masa sih kita setiap bulan mau belinya itu lagi, itu lagi, ya kan? Ya nggak ngelak aja ya, maksudnya gini, orang tua manapun juga pasti buat kayak kebutuhan pribadi gitu ya, kayak buat nginiin dapur, buat belanja, ini itulah namanya.” (Informan AN, 13 Maret 2026)

Menurut AN, kebutuhan perlengkapan sekolah tidak selalu harus dibeli setiap bulan. Ketika kebutuhan sekolah anak dirasa sudah cukup terpenuhi, sisa dana KJP Plus kemudian digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. AN juga menjelaskan bahwa dirinya biasanya membeli perlengkapan sekolah dalam jumlah lebih banyak guna stok barang, sehingga pada bulan berikutnya dana KJP Plus dapat dialihkan untuk kebutuhan lain di luar pendidikan. AN memandang bahwa kondisi

tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan oleh orang tua ketika berada di dalam tekanan ekonomi dan memiliki kebutuhan hidup yang terus berjalan setiap hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bagi keluarga dengan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi, bantuan sosial seperti KJP Plus dapat berubah fungsi menjadi sumber penopang ekonomi keluarga. Tidak hanya digunakan untuk mendukung pendidikan anak, bantuan tersebut juga dimanfaatkan sebagai strategi bertahan hidup agar kebutuhan dasar keluarga tetap terpenuhi di tengah keterbatasan ekonomi dan ketidakpastian pendapatan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana KJP Plus oleh keluarga beneficiari tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, yang mana program KJP Plus dirancang untuk menunjang seluruh kebutuhan pendidikan anak. Namun, pada realitasnya, pemanfaatan dana KJP Plus di lapangan menunjukkan adanya penggunaan dana yang lebih luas dan fleksibel sesuai dengan kondisi dan tekanan kehidupan keluarga beneficiari. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keluarga penerima manfaat tidak hanya memanfaatkan dana KJP Plus milik anak mereka untuk pemenuhan pendidikan anak, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti kebutuhan pangan keluarga, kebutuhan dapur, hingga uang jajan anak, menunjukkan bahwa ketika kebutuhan dasar belum sepenuhnya terpenuhi, maka bantuan pendidikan yang mereka terima akhirnya dimanfaatkan untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga secara keseluruhan. Temuan tersebut juga berkaitan dengan kondisi perempuan rawan sosial ekonomi, khususnya ibu tunggal atau perempuan yang memegang tanggung jawab utama dalam mengelola rumah tangga dan kebutuhan keluarga. Keterbatasan ekonomi yang mereka hadapi tidak mengurangi peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga (Nurwati & Listari, 2021). Sebagai perempuan yang rawan pada aspek sosial ekonomi sekaligus orang tua dari anak penerima manfaat bantuan program KJP Plus, para informan harus mengambil keputusan terkait penggunaan bantuan sosial di tengah tekanan ekonomi keluarga yang mereka hadapi. Kondisi ini sesuai apabila ada ketidakseimbangan antara pemasukan dengan pengeluaran rumah tangga, maka keluarga akan terdorong untuk melakukan berbagai tindakan

untuk dapat mencapai kondisi yang dianggap lebih aman dan stabil. Dalam konteks penelitian ini, tindakan seperti penggunaan dana KJP Plus untuk kebutuhan pangan hingga “gesek tunai” saldo KJP Plus dapat dilihat sebagai strategi keluarga dalam menghadapi tekanan ekonomi yang mereka alami.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan dana KJP Plus bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga. Kondisi ini berkaitan dengan konsep dinamika oleh S. P. Robbins & Judge (2013) yang ditandai oleh tingkat volatilitas, yaitu kondisi ketidakstabilan dan perubahan yang berlangsung cepat sehingga keluarga benefisiari harus terus menyesuaikan strategi pemenuhan kebutuhan mereka. Pendapatan yang tidak menentu, keterlambatan pencairan bantuan, kebutuhan sekolah yang berubah-ubah, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan membuat keluarga benefisiari harus bersikap fleksibel dalam memanfaatkan bantuan yang tersedia. Akibat kondisi dan tekanan keluarga yang tidak stabil, pola pemanfaatan dana KJP Plus juga berubah-ubah dan tidak selalu konsisten dari waktu ke waktu.

Ketika kebutuhan sekolah meningkat, dana KJP akan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pendidikan anak. Sedangkan ketika kebutuhan rumah tangga dirasa lebih mendesak, dana KJP Plus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang muncul tersebut mencerminkan berbagai tingkatan kebutuhan dalam kehidupan keluarga seperti yang telah dikelompokkan Maslow (1943) dalam (Yuliana, 2018). Pada tingkat kebutuhan fisiologis (*physical needs*), dana KJP Plus juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan sehari-hari keluarga penerima manfaat, sembako, hingga uang jajan anak. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas utama bagi keluarga benefisiari adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup mereka. Selanjutnya, kebutuhan rasa aman (*safety needs*), KJP Plus memberikan rasa aman secara ekonomi bagi keluarga benefisiari karena mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan anak mereka serta membantu mengurangi beban kebutuhan dasar keluarga mereka. Beberapa informan juga mengungkapkan ketakutan mereka apabila tidak ada bantuan KJP Plus yang selama ini sangat membantu bagi keluarga benefisiari. Pada kebutuhan sosial (*social needs*), terlihat bahwa orang tua yang rentan terhadap

kondisi sosial dan ekonomi juga berupaya agar anak mereka dapat mengikuti kegiatan sekolah dan berinteraksi tanpa merasa berbeda dengan teman-temannya melalui pemenuhan kebutuhan sekolah yang layak, memastikan anak mereka mendapatkan uang saku dan juga berkontribusi dalam iuran-iuran sekolah meskipun hal tersebut memberatkan para informan. Hal ini sejalan dengan penjelasan mengenai social needs oleh Yuliana (2018) yang mengatakan bahwa kebutuhan sosial juga bersifat psikologis yang menyangkut kebutuhan dalam berinteraksi dan diterima di lingkungan sosial. Selain itu, kebutuhan penghargaan (*esteem needs*) juga tampak ketika orang tua berusaha menjaga agar anak mereka tidak merasa rendah diri akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Orang tua memastikan bahwa dengan bantuan KJP Plus yang telah diterima, paling tidak anak bisa hadir di sekolah dengan rapi, layak, dan dapat diterima di lingkungannya. Sementara itu, kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization*) menunjukkan adanya keinginan orang tua untuk membantu anak mencapai kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan orang tua melalui pendidikan.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya konflik psikologis dalam pengambilan keputusan keluarga benefisiari terkait pemanfaatan dana KJP Plus yang mereka terima. Jika dikaitkan dengan teori psikodinamika Freud, perilaku para informan dapat dilihat melalui perspektif id, ego, dan superego (Hamidah et al., 2025). Dorongan untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk kebutuhan pendidikan anak di dalamnya dapat dipahami sebagai bentuk dorongan naluri (id). Sementara itu, kesadaran bahwa penggunaan dana KJP Plus seharusnya sesuai dengan aturan yang berlaku mencerminkan norma moral (superego). Di sisi lain, ego muncul dengan mencari solusi yang dianggap paling realistis agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi, meskipun harus menggunakan bantuan sosial yang tidak diperuntukkan untuk kebutuhan keluarga. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana KJP Plus oleh keluarga benefisiari khususnya pada keluarga perempuan rawan sosial ekonomi tidak hanya sebatas apakah pemanfaatan tersebut sudah sesuai dengan aturan program atau tidak. Namun, pemanfaatan bantuan KJP Plus oleh para informan menunjukkan adanya proses penyesuaian dan perluasan fungsi bantuan di tengah tekanan sosial

dan ekonomi yang mereka hadapi. Dalam situasi tersebut, dana KJP Plus tidak hanya dimaknai sebagai bantuan pendidikan untuk anak mereka, tetapi juga sebagai bantuan bagi keluarga benefisiari untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga sehari-hari.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika pemanfaatan dana KJP Plus bagi keluarga penerima manfaat pada keluarga perempuan rawan sosial ekonomi di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada keluarga benefisiari yang kondisi ekonominya relatif lebih stabil, dana KJP Plus lebih banyak dimanfaatkan sesuai tujuan program, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak seperti pembayaran SPP, pembelian perlengkapan sekolah, biaya transportasi hingga sebagai tabungan pendidikan anak.
2. Pada keluarga benefisiari dengan kondisi ekonomi yang lebih rentan terhadap risiko kemiskinan, dana KJP Plus tidak hanya dimanfaatkan untuk pendidikan, tetapi juga dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, terutama kebutuhan pangan, belanja dapur, serta kebutuhan yang paling mendesak pada saat itu. Penggunaan tersebut merupakan strategi bertahan hidup di tengah keterbatasan pendapatan dan tingginya beban ekonomi keluarga.
3. Perbedaan pola pemanfaatan menunjukkan bahwa latar belakang dan tekanan ekonomi memengaruhi pengambilan keputusan keluarga dalam menggunakan dana KJP Plus. Ketika kebutuhan pendidikan meningkat, dana digunakan untuk pendidikan. Namun, ketika kebutuhan dasar keluarga lebih mendesak, dana dialihkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga pemanfaatannya menjadi lebih fleksibel daripada yang dirancang dalam kebijakan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan dinamika yang terjadi merupakan hasil dari penyesuaian yang terus-menerus antara tujuan program KJP Plus dengan realitas kehidupan keluarga perempuan rawan sosial ekonomi sebagai keluarga benefisiari. Dinamika tersebut terlihat dari perubahan prioritas penggunaan dana yang mengikuti perubahan kondisi dan kebutuhan keluarga dari

waktu ke waktu. Oleh karena itu, dinamika pemanfaatan dana KJP Plus tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk kepatuhan atau penyimpangan terhadap ketentuan program, tetapi juga sebagai strategi adaptasi keluarga perempuan rawan sosial ekonomi dalam menghadapi tekanan sosial dan ekonomi, tanpa mengesampingkan upaya untuk tetap memenuhi kebutuhan pendidikan anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan tidak hanya berfokus pada pengawasan penggunaan dana KJP Plus, tetapi juga perlu memahami kondisi sosial ekonomi keluarga penerima secara menyeluruh. Pendampingan dan evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan agar pemanfaatan bantuan dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan tujuan program. Selain itu pemerintah juga perlu memastikan seluruh fasilitas pendukung program KJP Plus dapat berjalan dengan baik dan mudah diakses oleh penerima manfaat sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan bantuan.
2. Pihak sekolah diharapkan lebih memperhatikan kondisi ekonomi keluarga penerima bantuan KJP Plus dan mengurangi adanya pungutan atau iuran yang berpotensi memberatkan orang tua siswa. Sekolah juga diharapkan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana KJP plus oleh orang tua siswa sebagai penerima manfaat program KJP Plus.
3. Bagi keluarga penerima manfaat diharapkan dapat lebih bijak dalam mengelola dan memprioritaskan penggunaan dana KJP Plus sesuai dengan tujuan utama program. Selain itu keluarga penerima manfaat juga diharapkan dapat mencari upaya lain dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga bantuan yang diperuntukkan bagi pendidikan anak dapat lebih difokuskan untuk kebutuhan yang sesuai dengan ketentuan program.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pemanfaatan bantuan sosial pendidikan dengan cakupan wilayah yang lebih

luas dan informan yang lebih beragam agar diperoleh gambaran yang lebih mendalam terkait dinamika dalam pemanfaatan bantuan sosial di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrazak, R., Dwimawanti, I. H., & Djumiarti, T. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS DI SMAN 83 KECAMATAN CILINCING KOTA JAKARTA UTARA. *Journal of Management & Public Policy*, Vol. 13.,.
- Aditama, F. (2019). *DINAMIKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS POTENSI DESA*.
- Afriansyah, A. (2017). Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Di Provinsi Dki Jakarta : Peluang Dan Tantangan Dalam Pemenuhan Keadilan Sosial Di Bidang Pendidikan the Implementation of Jakarta Smart Card in Dki Jakarta : Opportunities and Challenges Fulfillment of Social Jus. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1).
- Amelia, R., Suwarsono, R., Munip, A., & Kurniawan. (2024). *Perempuan sebagai Pelaku Ekonomi Rumah Tangga : Narasi Perjuangan dan Ketahanan dalam Konteks Gender*. 10(2), 60–69.
- Andari, S., Febriyandi, F., Martino, Kuntjorowati, E., Listyawati, Yusuf, H., & Murdiyanto. (2022). *Efforts of Socio-Economical Vulnerable Women To Improve the Quality of Life and Family Welfare*. 8(03), 242–256.
- Apriliandra, S., Suwandi, A. A., & Darwis, R. S. (2022). Peran Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan Komunitas Perempuan Rawan Sosial dan Ekonomi. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 27–39.
- Arifin, A. N., Marwanti, T. M., & Haryani, A. (2019). Keterampilan Sosial di kalangan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi: Satu Kajian di Kota Bandung, Indonesia. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 4(3), 128–139.
- Astuti, T. W., & Fawzi, I. L. (2021). EVALUASI PROSES PELAKSANAAN PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 257 JAKARTA Triwulan Woro Astuti 1 , Indra Lestari Fawzi 2. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*,

7(2), 1–36.

Astutik, J., Sulistyowati, T., & Meidianti, E. (2019). Strategi Survival Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Kepala Keluarga (Study pada Perempuan Penyandang Disabilitas di Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang). *Jurnal Perempuan Dan Anak (JPA)*, 2(2), 35–46.

Barrientos, A. (2013). *Social Assistance in Developing Countries*. Cambridge University Press.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=qWsoAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR10&dq=social+assistance&ots=3sLZtEpnfa&sig=tcSl6PqEgHV_B8SQxutOBXsrNo8

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *SAGE Publications, Inc.*
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Danadhyaksa, H., Salsabila, L. A., Daffany, Z. A., & Fatkhuri. (2026). Evaluasi KJP terhadap Ketepatan Sasaran melalui Pembaruan Data dan Perbaikan Birokrasi. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*.

Fajarwati, A., Latifah, E., Sari, P., & Putrie, G. (2017). Strategi untuk Mengatasi Permasalahan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). *Majalah Geografi Indonesia*, 31(1).

Fatah, A. (2024). *INTERPERSONAL COMMUNICATION BETWEEN PARENTS AND TEENAGER IN PREVENTING FREE ASSOCIATION IN PEKAYON I VILLAGE, RW 03, PASAR MINGGU, SOUTH JAKARTA*.

Fatimah, R., Sunarti, E., & Hastuti, D. (2020). Economic Pressure , Parent-Adolescent Interaction , Abstract. *Jur. Ilm. Kel. & Kons*, 13(2), 137–150.

Febrian, R. A. (2021). Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Manajemen Keuangan Keluarga Selama Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Entrepreneurship, Management and Industry (JEMI)*, 4(3), 113–122.
<https://doi.org/10.36782/jemi.v4i3.2236>

Firdaus, I., Tari, C. I., Azza Herviana, N. A., Putri, D. A., Richanura, A., & Mahayani, N. (2024). Penerapan teknik participatory rural appraisal (PRA) pada wanita rawan sosial ekonomi di margamulya. *Journal of Social and Economics*

- Research*, 6(2), 348–358. <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>
- Hakim, F. B., Yunita, P. E., Supriyadi, D., Isbaya, & Ramly, A. T. (2021). Persepsi , Pengambilan Keputusan , Konsep diri dan Values. *Jurnal Ilmiah Pascasarjana, Persepsi, Pengambilan Konsep Diri Dan Values*, 1(3), 156–165.
- Hamidah, Z., Istiqomah, K., Haliza, N. D., & Kusmawati, A. (2025). Implementasi Teori Psikodinamika dalam Mengatasi Kesehatan Mental. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(5), 38–45. <https://journal.appisi.or.id/index.php/risoma>
- Jauhari, P. R. (2025). Pemenuhan Akses Pendidikan bagi Siswa Melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) (Studi Kasus: Siswa Penerima Kartu Jakarta Pintar Plus di SMAN 48 Jakarta). 5(1), 287–301.
- Lestari, N. S., & Kananto, R. (2020). Analisis penggunaan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dalam rencana pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa di SMK Nurul Islam Jakarta. 4(2), 1–23.
- Lubis, N. (2018). Coping Strategy Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Memenuhi Kebutuhan Keluarga Di Kampung Adat Cijere, Rancakalong, Sumedang. *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 17(1), 37–54. <https://doi.org/10.31595/peksos.v17i1.128>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications, Inc.
- Nainah, E., Jamaludin, U., & Bahrudin, F. A. (2023). Implementasi Bantuan Sosial Pendidikan Program Indonesia Pintar sebagai Tanggung Jawab Negara terhadap Warga Negara (Studi Deskriptif di SMP Negeri 1 Kresek , Kecamatan Kresek , Kabupaten Tangerang-Banten). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 29–40.
- Nurdin, A. (2019). IMPLEMENTASI DANA KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) (Sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan). *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 2(1), 49–62. <https://doi.org/10.36670/alamin.v2i1.16>
- Nursalim, Sasmita, W., Fauziah, H. U., Andyastuti, E., Widodo, A., & Suratman. (2025). *Penanaman Pola Asuh dan Keteladanan Orang Tua terhadap*

- Pembentukan Nilai Anti Korupsi Anak di Keluarga. 10(3), 2130–2139.*
- Nurwati, R. N., & Listari, Z. P. (2021). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak. *Share : Social Work Journal, 11(1)*, 74. <https://doi.org/10.24198/share.v11i1.33642>
- Pasolong, H. (2023). Teori Pengambilan Keputusan. In *Penerbit Alfabeta, Bandung* (x. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Pub. L. No. 8 (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130231/permensos-no-8-tahun-2012>
- Pertiwi, Y. M., & Rengga, A. (2016). Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (Kjp) Pada Sekolah Dasar Negeri (Sd) Di Jakarta Timur Wilayah II. *Journal of Management & Public Policy, Vol. 5., N.*
- Pramono Teken KJP Plus Tahap 2, 707.513 Penerima-Anggaran Rp 1,61 T (2025). <https://news.detik.com/berita/d-8106982/pramono-teken-kjp-plus-tahap-2-707-513-penerima-anggaran-rp-1-61-t>
- Pranita, U., Kurniah, N., & Suprpti, A. (2018). *Supervisi Klinis Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu Auladuna Kota Bengkulu (Studi Deskriptif Kualitatif di PAUD IT Auladuna Kota Bengkulu)*. 3(1), 54–65.
- Robbins, B. (2017). *The Beneficiary*. Duke University Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Mfk9DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA4&dq=beneficiary+meaning&ots=d7b5u0zHnw&sig=t3uUNY2cXzvQSXBn5uwOz8fwAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). Organizational Behavior. In *Pearson Education, Inc.*
- Rowe, L. (2025). DKI Gratiskan Layanan Masuk Museum bagi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, dan Pemegang Kartu KJP. *Arah Destinasi*. https://arahdestinasi.com/travelnews/96244_dki-gratiskan-layanan-masuk-museum-bagi-penyadang-disabilitas--lanjut-usia--dan-pemegang-kartu-kjp
- Ruswati, T. (2018). Bentuk Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Oleh Wanita Pekerja Pembuat Bulu Mata Palsu (Tinjauan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham

- Maslow). *Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*.
- Sari, A. O., Sulistyowati, R., & Prihantika, I. (2020). DAMPAK SOSIAL EKONOMI PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) EXIT MANDIRI DALAM PERSPEKTIF THE MOST SIGNIFICANT CHANGE TECHNIQUE (MSCT). *Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(3), 373–382.
- Sari, N. M., Putrie, C. A. R., & Nurhayati. (2020). Pengaruh Kartu Jakarta Pintar (Kjp) Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas XII Di SMK Dharma Putra 1 Jakarta. *Research and Development Journal of Education*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.30998/rdje.v1i1.6439>
- Septiawan, A., & Wijaya, S. H. (2021). Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Indonesia. *Repository.Unej.Ac.Id*, 449–461. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/102561>
- Shindy, G. T., Mukhlis, S., & Prastiyo, E. B. (2022). *PERSEPSI PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI (PRSE) TERHADAP PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM MENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA*. 7(3).
- Siagian, D. A. (2024). *Evaluasi Dampak Program Bantuan Pendidikan di Sekolah Bagi Anak Miskin dan Kurang Mampu di Labuhanbatu*. 2(2), 143–149.
- Siagian, J. P., & Subroto, M. (2024). Perempuan Sebagai Kelompok Rentan. *Jurnal Educatio*, Vol. 10, N(Perempuan Sebagai Kelompok Rentan), 174–178. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/educatio>
- Simamora, Y. A., Yuliani, D., & Wardhani, D. T. (2019). Hardiness Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi di Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. *LINDAYASOS: Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial*, 1(2), 2019.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *ALFABETA*. Penerbit ALFABETA.
- Sulistyowati, R. endah, Rachmawati, I., & Meigawati, D. (2019). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA SUKABUMI: STUDI KASUS PEMBERDAYAAN WANITA RAWAN SOSIAL*

EKONOMI. 2(2), 1–12.

Syahban, N. (2024). FENOMENA “GADAI KJP” SEBAGAI PENYIMPANGAN DI KELURAHAN MANGGARAI JAKARTA SELATAN. *JDPS : Jurnal Diskursus Pendidikan Sosiologi*, 5(2), 81–102.

Uswanas, K. P., & Nuraida, R. (2023). *Perlindungan Sosial Melalui Program Keluarga Harapan di Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak*. 3(2), 228–246.

Utomo, K. S., & Haryani, T. N. (2019). Mengurai Feminisasi Kemiskinan Kepala Rumah Tangga Perempuan (Kajian Pada Program PFK Jalin Matra). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 3(1), 15–23.

Wahyudi, D., Nugraha, A. R., & Ismanto, D. T. (2026). *Ketergantungan Penerima Bantuan Sosial dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang*. 3, 16–24.

Wijaya, A., Rahman, A., Ghani, & Yuliawati, S. (2023). Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar (Kjp) Plus Di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur. *Jurnal Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*, 5(1), 1–13.
<https://doi.org/10.22236/jppp.v5i1.11524>

Wulandari, F. Y., Sabrina, Intan, Ariani, T., & Syam, H. (2025). Tekanan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Anggota Keluarga. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 84–95.

Yulfa, R., Puspitawati, H., & Muflikhati, I. (2022). TEKANAN EKONOMI, COPING EKONOMI, DUKUNGAN SOSIAL, DAN KESEJAHTERAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsultasi*, 15(1), 14–26.

Yuliana, A. (2018). Teori Abraham Maslow dalam Analisa Kebutuhan Pemustaka. *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan*, 6(2), 349–376.
<https://doi.org/10.21043/libraria.v6i2.3845>

Yusuf, F. R., & Ismanto, H. (2024). *Identifikasi Hambatan Pengembangan Usaha Properti CV.99 Bersinar di Kabupaten Gresik*. 02(02), 189–204.

LAMPIRAN

